



TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH DI KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA

NIM. 500704354

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH di KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA

Husada.bumilaut@gmail.com

Program Pascasarjana

Universitas Terbuka

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota terbesar ke tiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2019 mencapai 1.349.775 jiwa. Dari segi penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan warga atas berbagai jenis pelayanan umum, pemerintah dari waktu ke waktu dihadapkan pada dinamika penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik. Di sejumlah sektor, seperti penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, upaya menanggulangi kemacetan dan sejumlah pelayanan lainnya, Pemerintah Kota telah membuat kebijakan meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Pemerintahan Kota Batam telah menggulirkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi, upaya menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam yang dilakukan pada pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam serta menganalisis bentuk partisipasi masyarakat menurut latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampah. Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam telah diperoleh data tentang tingkat keberhasilan pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan rekaman wawancara dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan teori-teori implementasi. Key informan penelitian ini antara lain Kabid DLH, Anggota DPRD Komisi III, Kasi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, staf Pengawas Pengelolaan sampah, Tokoh Masyarakat 3 orang dan 1 orang Masyarakat.

Hasil dari penelitian menunjukkan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal, Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat, dimana masyarakat di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum memahami implementasi atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang. Pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat untuk dapat memahami pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pelaksanaan implementasi kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat paham betul luaran dari kebijakan yang diterapkan.

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH di KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA
Husada.bumilaut@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Batam City is the largest city in the Riau Islands Province and is the third largest city with a population in Sumatra after Medan and Palembang, with a population in 2019 reaching 1,349,775 people. In terms of the implementation of government functions, especially in fulfilling the needs of citizens for various types of public services, the government from time to time is faced with the dynamics of the implementation of public services. In a number of sectors, such as providing education, improving health services, improving waste management services, efforts to overcome congestion and a number of other services, the City Government has made a policy to improve waste management services. Batam City Government has passed Batam City Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management. The duties of local governments in waste management include efforts to develop and increase public awareness and participation in waste management, facilitate, develop and implement efforts to reduce, handle and utilize waste.

The purpose of this research is to analyze the implementation of waste management in Bengkong District, Batam City which is carried out on the implementation of waste management in Bengkong District, Batam City and to analyze forms of community participation according to different socio-economic backgrounds in waste management. By making observations, interviews and in-depth documentation, data has been obtained about the success rate of waste management.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data generated in this study in the form of written words and recorded interviews were analyzed by describing or describing the data that had been collected using implementation theories. The key informants of this research include the Head of DLH, Members of the DPRD Commission III, the Section Head of Friendship and Solid Waste Management, Waste Management Supervisory staff, 3 community leaders and 1 community member.

The results of the study show that in general the implementation of waste management policies in Bengkong District, Batam City is still not optimal, Bengkong District in implementing the policies that have been made, where people in Bengkong District, Batam City still do not understand the implementation or implementation of 3R (reuse, reduce, recycle) reuse, reduce and recycle. The government needs to provide information that is relevant and easily accepted by the community in order to understand the implementation of the policies made by the government which are useful for improving the overall welfare of the community in Batam City, especially in Bengkong District. The implementation of policy implementation requires good socialization to the public, so that the community fully understands the output of the policy being implemented.

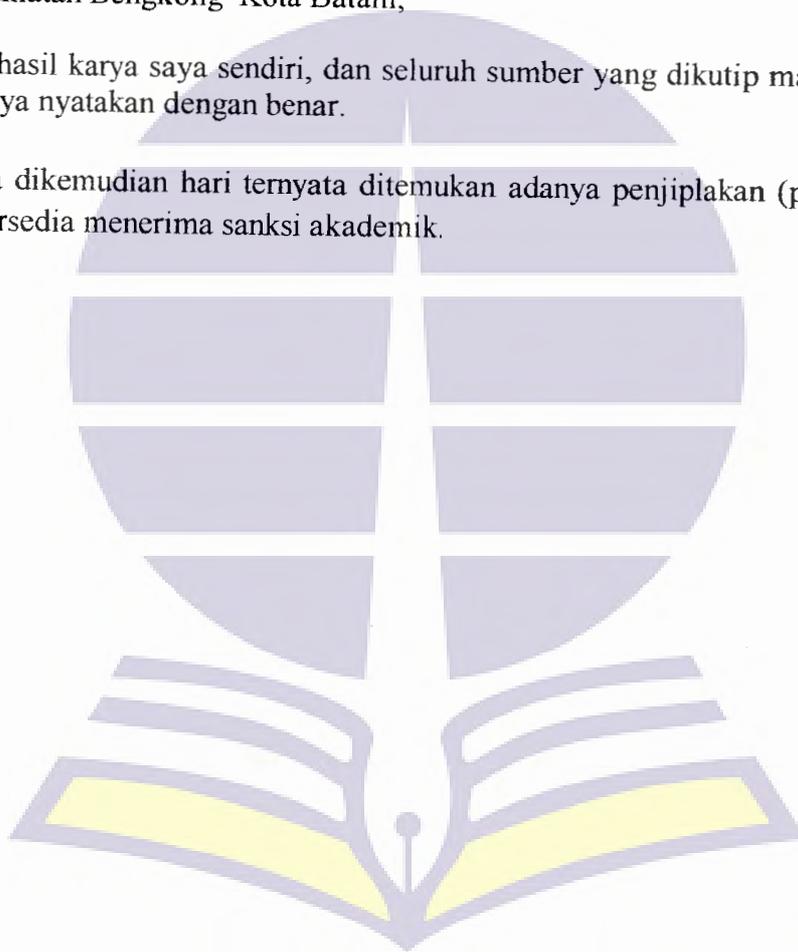
**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam,

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



Batam, 09 September 2020

Yang menyatakan



MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA

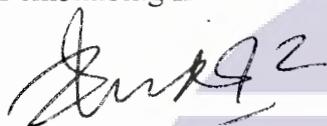
NIM : 500704354

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
di Kecamatan Bengkong Kota Batam.
Penyusun TAPM : Muhammad Citra Husada Batubara
NIM : 500704354
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Menyetujui :

Pembimbing II



Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.
NIP 197102191998022001

Pembimbing I



Lisman Manurung, M.Si, Ph.D
NIP 195307211983031001

Penguji Ahli



Djaka Permana, M.Si., Ph.D

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP 195910271986031003

Dekan Fakultas Hukum,
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
NIP 196606191992031002

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Citra Husada Batubara
NIM : 500704354
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Analisis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam (Studi Kasus Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam)
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Pogram Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :
Hari/Tanggal : Rabu/12 Agustus 2020
Waktu : 12:35 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Dr. Darmanto, M.Ed.

Penguji Ahli
Nama : Djaka Permana, M.Si., Ph.D.

Pembimbing I
Nama : Lisman Manurung, M.Si, Ph.D.

Pembimbing II
Nama : Made Yudhi Setiani, S.IP., M.Si., Ph.D.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam” ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

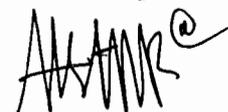
1. Bapak Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D., Rektor Universitas Terbuka yang telah menerima dan memberikan kesempatan pada penulis untuk mengikuti studi program Magister Administrasi Publik Universitas terbuka.
2. Bapak Dr. Sofjan Aripin, M.Si., Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed., Ketua Pasca Sarjana Hukum, Sosial dan Politik Universitas Terbuka selaku Ketua Komisi Penguji.
4. Bapak Lisman Manurung, M.Si, Ph.D atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing satu.
5. Ibu Made Yudhi Setiani, S.IP, M.Si, Ph.D atas saran, bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing dua.

6. Bapak Eliaki Gulo, SE., M.M., Kepala UPBJJ-UT Batam yang telah memfasilitasi kegiatan belajar mahasiswa Program Pasca Sajana Universitas Terbuka di Batam.
7. Bapak Djaka Permana, M.Si., Ph.D selaku Penguji Ahli.
8. Bapak Muhammad Yunus Muda SE, MM Anggota DPRD Kota Batam yang telah sudi untuk dijadikan narasumber penelitian.
9. Kepada Seluruh Staf Kecamatan Bengkong yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas sumbangsihnya memberikan informasi dan data yang relevan dalam penulisan tesis ini.
10. Ayah dan Ibunda tercinta dan ibu mertua yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya untuk penyelesaian tesis ini
11. Istri tercinta Layli Fajri dan anak tersayang Ar Rayyan Batubara serta seluruh keluarga yang telah banyak berkorban waktu dan tenaga, memberikan motivasi, perhatian serta doanya untuk penyelesaian tesis ini.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang ramah lingkungan.

Batam, 09 September 2020



Muhammad Citra Husada Batubara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Citra Husada Batubara
NIM : 500704354
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat / Tanggal Lahir : Batam, 28 Oktober 1989

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Kota Batam pada tahun 2001
Lulus SLTP di Kota Batam pada tahun 2004
Lulus SMA di Kota Batam pada tahun 2007
Lulus S1 Ilmu Administrasi Negara di Kota Medan pada tahun 2012

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2012 s/d 2016 sebagai staf di Perusahaan Pelayaran Internasional Hanjin Shipping.
Tahun 2016 s/d Sekarang sebagai staf di Perusahaan Internasional Yangming Shipping.
Tahun 2019 s/d Sekarang sebagai Staf Ahli Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam

Batam, 09 September 2020



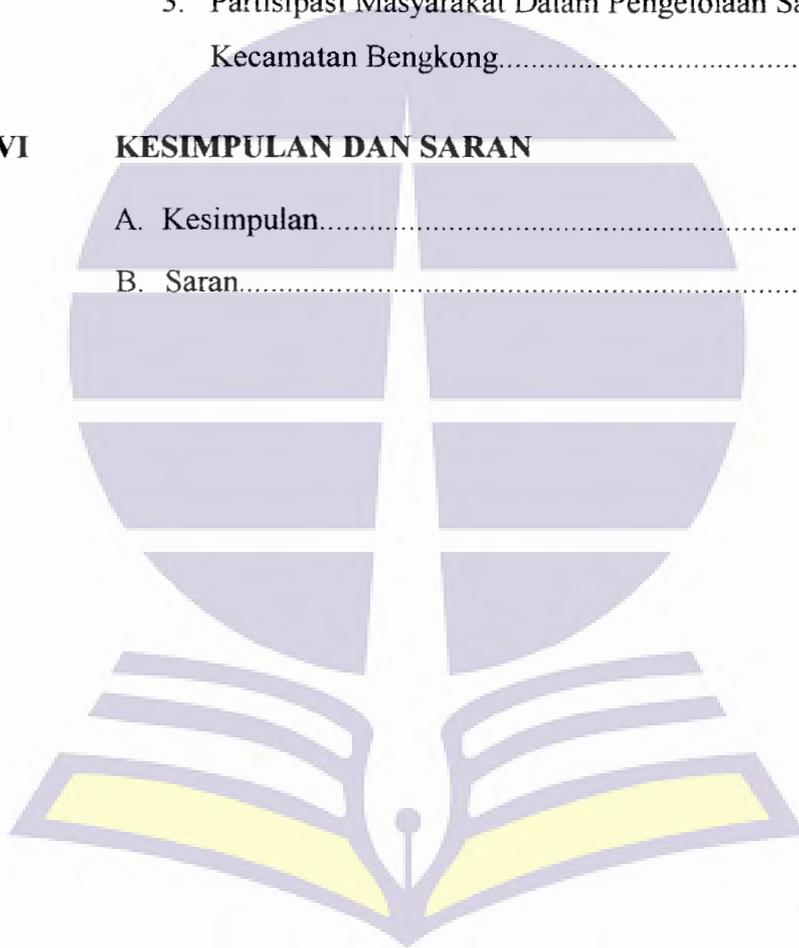
Muhammad Citra Husada Batubara
NIM. 500703639

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Pernyataan.....	iii
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi Kebijakan Publik.....	18
1. Konsep Teori Implementasi Kebijak.....	21
2. Perumusan Kebijakan Publik.....	25
3. Model Kebijakan Publik Model Merile S. Grindle.....	31
a. Interest Affected.....	32
b. Type of Benefits.....	32
c. Extent of Change Envision.....	33
d. Site of Decision Making.....	33
e. Program Implemeter.....	33

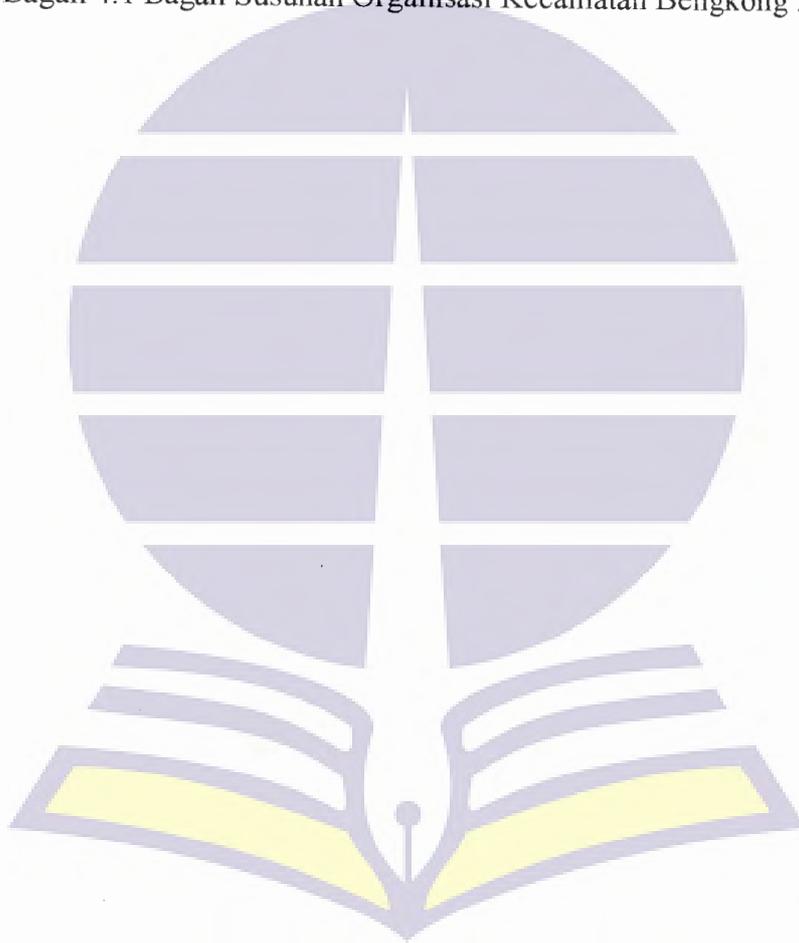
f. Resources committed.....	33
B. Pengertian Pelayanan Publik.....	35
1. Teori Pelayanan Publik.....	37
2. Kualitas Pelayanan Publik.....	39
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik	40
a. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan.....	44
b. Sumber-sumber Kebijakan.....	45
c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaa.....	45
d. Karakteristik Badan-badan Pelaksana.....	46
e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik.....	47
f. Kecenderungan Pelaksanaan.....	48
C. Partisipasi Masyarakat.....	49
D. Pengertian Sampah.....	52
E. Pengertian Bank Sampah.....	54
F. Penelitian Terdahulu.....	57
G. Kerangka Konsep.....	64
H. Defenisi Operasional.....	65
BAB III	
METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	68
B. Jenis Penelitian.....	72
C. Lokasi Penelitian.....	73
D. Metode Pengumpulan Data.....	74
E. Sumber Data dan Jenis D.....	75
F. Informan Penelitian.....	76
G. Teknik Analisis Data.....	79
H. Kendala Dalam Penelitian.....	80
BAB IV	
GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Umum Kota Batam	83

	B. Sejarah Umum Kecamatan Bengkong Kota Batam.....	85
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil dan Pembahasan.....	96
	1. Implementasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong.....	97
	2. Pelayanan Publik dalam Pengelolan Sampah di Kecamatan Bengkong.....	107
	3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bengkong.....	111
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran.....	124.



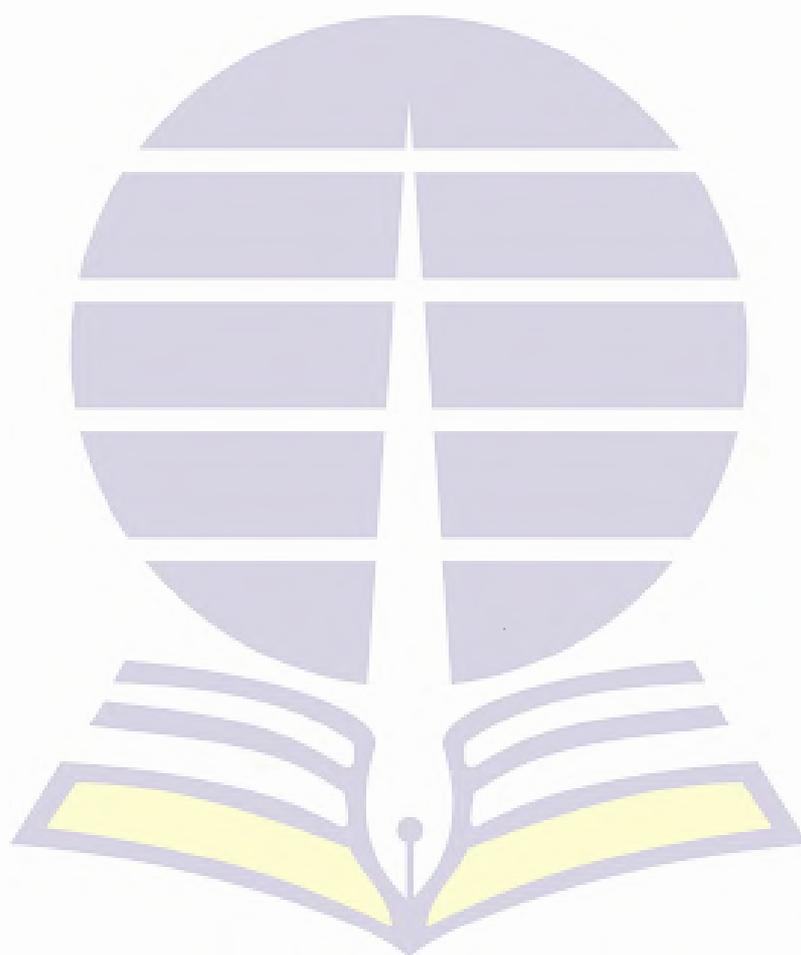
DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Implementasi sebagai delivery mechanism policy output.....	24
Bagan 2.2 Proses Implementasi.....	29
Bagan 2.3 Model Donald Van Meter dan Carl Van Hon.....	44
Bagan 2.4 Kerangka Berfikir.....	65
Bagan 4.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong	92



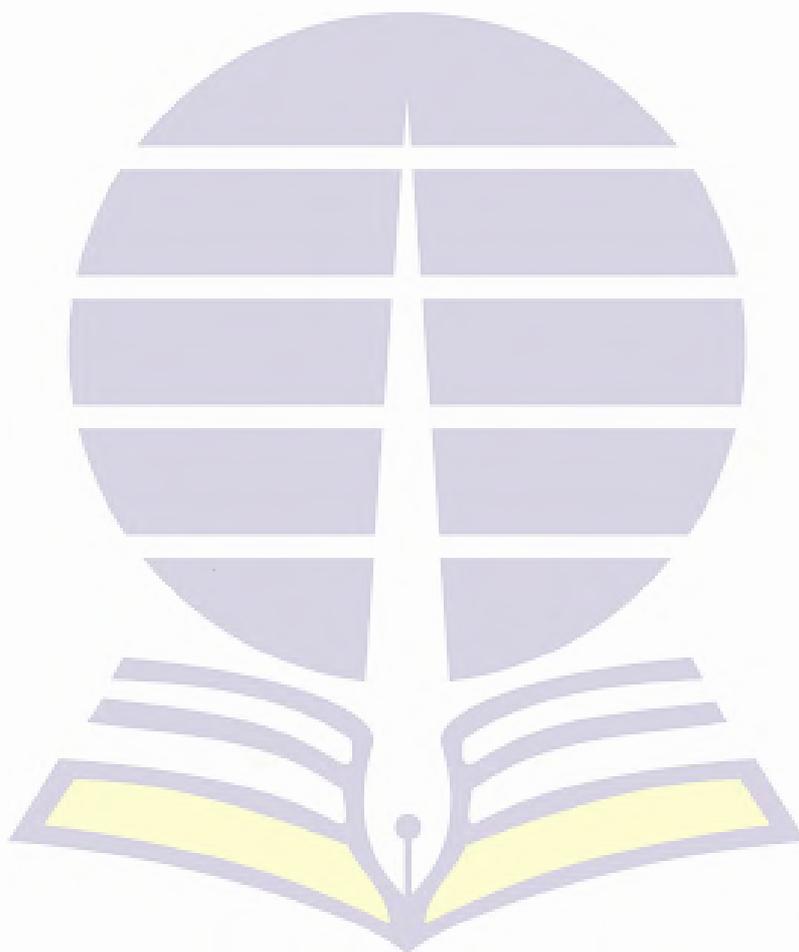
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	77
Tabel 4.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan.....	87



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Bengkong.....	87
Gambar 4.2 Lokasi TPS Kecamatan Bengkong.....	88
Gambar 4.3 Proses Kegiatan Bank Sampah Kecamatan Bengkong	89
Gambar 4.4 Kegiatan Bank Sampah Kota Batam.....	89
Gambar 4.5 Loakasi Bank Sampah Kecamatan Bengkong.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat penjelasan rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Selain itu di dalam bab 1 ini dikemukakan signifikansi penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar di dunia setelah negara China, India dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia yang tercatat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018 sebanyak 265 juta jiwa. Diperkirakan pada tahun 2020 akan meningkat 1.19% pertahun menjadi 271,3 juta jiwa. Adapun penduduk perkotaan mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2019 telah mencapai 51%. Pesatnya perpindahan penduduk dari desa ke perkotaan menimbulkan banyak permasalahan.

Salah satu akibat dari semakin bertambahnya jumlah penduduk tersebut adalah bertambahnya limbah atau buangan sampah yang dihasilkan penduduk setiap hari. Data mengenai kenaikan jumlah sampah penduduk perkotaan di Indonesia akan mengalami kenaikan sebanyak 60% sampah organik dan 15% sampah plastik, limbah sampah yang ditimbulkan terutama di daerah perkotaan telah menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditanggulangi oleh *stakeholders* yakni pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat. Permasalahan ini dapat dilihat di hampir sebagian kota-kota besar di Indonesia seperti di wilayah Jabodetabek, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya.

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam tiga dekade terakhir ini. Kota Batam merupakan kota dengan penduduk terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, yakni tahun 2019 berpenduduk kurang lebih 1.349.775 jiwa, yang mendiami wilayah seluas 1,595 km². Kota Batam yang merupakan kota industri sekaligus menjadi pusat aktivitas bisnis dan industri terkemuka di Indonesia, maka pertumbuhan di berbagai sektor jauh lebih pesat di wilayah Kota Batam dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Dilhat dari kondisi geografis Kota Batam merupakan daerah kepulauan, dimana mempunyai daerah daratan yang terbatas dan dikelilingi oleh lautan. Apabila pemerintah tidak serius dalam penanganan pengelolaan sampah di Kota Batam maka ke depan akan menimbulkan permasalahan yang baru yaitu, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai karena keterbatasan lahan untuk pembuangan sampah akhir. Oleh sebab itu pemerintah harus bekerja keras dan bahu membahu dalam penyelesaian permasalahan pengelolaan sampah Kota Batam kedepannya secara bersama-sama dengan *stakeholder* dan masyarakat.

Dari segi penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan warga atas berbagai jenis pelayanan umum, pemerintah Kota Batam dari waktu ke waktu dihadapkan atas berbagai dinamika penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik. Di sejumlah sektor, seperti penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, upaya menanggulangi kemacetan dan sejumlah pelayanan lainnya, Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai terobosan. Namun demikian, salah satu sektor pelayanan publik yakni pengelolaan sampah masih terasa kurang efektif. Padahal pengelolaan sampah yang baik semakin

penting di seluruh kota di dunia seiring dengan meningkatkan perhatian atas tata kelola lingkungan (*environment governance*) terkait erat dengan potensi ancaman atas kesehatan lingkungan.

Kota Batam adalah kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota terbesar ke tiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang. Berdasarkan visi Kota Batam, Kota Batam merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya Kota Batam sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bertumpu pada keunggulan komparatif sebagai kota perdagangan dan jasa, yang memiliki daya saing global dan mampu menjalankan fungsinya secara efisien, sehingga representatif dipandang dari kepentingan nasional dan internasional (RDTR Kawasan Perdagangan Nagoya).

Sebagai kota yang bertumbuh menjadi kota modern, pelayanan-pelayanan pemerintah dalam hal ini pemerintah Kota Batam diakui oleh banyak pihak tengah mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini menunjukkan tingginya apresiasi pemerintah Kota Batam untuk memberikan layanan terbaik kepada warga akhir-akhir ini. Namun demikian, Kota Batam menghadapi dualisme pengelolaan pemerintahan. Pada saat ini juga mempengaruhi proses berjalannya kegiatan pelayanan di Kota Batam. Dimana Kota Batam mempunyai pengelolaan dualisme pemerintahan yaitu BP Kawasan (Badan Pengusahaan Kawasan) dan Pemerintah Kota Batam mempunyai keunikan tersendiri dalam pengelolaan pemerintahan yang ada di Kota Batam yang mempengaruhi setiap kebijakan yang akan di keluarkan.

BP Kawasan memiliki peran dalam pemerintahan kota Batam untuk mengurus Industri dan lahan yang ada di Kota Batam, seperti Bandara, Pelabuhan

dan Kawasan Industri berada dibawah pengawasan BP Kawasan. BP Kawasan berperan penting dalam pengelolaan sampah di Kota Batam dengan menyediakan lahan untuk tempat penampungan sampah akhir Kota Batam. Seiring dengan peningkatan aktifitas di sektor-sektor bisnis dan industri serta meningkatnya taraf hidup warga kota dan otomatis meningkatkan pola konsumsi. Volume sampah yang timbul setiap hari sebagai sisa dari berbagai kegiatan manusia dan sektor lainnya pun semakin tinggi. Menurut perkiraan jumlah sampah yang membutuhkan pengelolaan di Kota Batam pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mencatat, setiap orang di Kota Batam kini rata-rata menghasilkan 0,5 kilo gram sampah per hari. Dengan penduduk Kota Batam sekitar 1,3 juta jiwa, maka timbulan sampah yang harus dibuang setiap hari dari wilayah kota ini mencapai 650 Ton sampah.

Di sisi lain, sebagai salah satu kota di jajaran negara berkembang yang tengah mengalami transisi menuju kota modern, Pemerintah Kota Batam menghadapi berbagai keterbatasan terutama dalam hal sumber keuangan oleh karena itu penyelenggaraan pengelolaan sampah, sebagaimana diharapkan pada Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan diteruskan dengan di bentuknya Perda Kota Batam No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah untuk mengatur tatacara pengelolaan sampah di Kota Batam, wajar saja jika tengah menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pembenahan-pembenahan.

Penanganan dan pengelolaan sampah sampai saat ini masih belum optimal. Sebagian besar penduduk masih melakukan proses penanganan dan pengelolaan sampah dengan sistem konvensional yakni Kumpul-Angkut-Buang dengan

penyelesaian akhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Permasalahan lain yang berpengaruh terhadap penanganan dan pengelolaan sampah adalah tingginya biaya operasional dan semakin sulitnya ruang yang sesuai untuk pembuangannya. Berdasarkan hasil evaluasi kebersihan kota-kota di Indonesia dapat diketahui bahwa tidak seluruh sampah dapat diangkut oleh kendaraan pengangkut sampah untuk dibuang ke TPA.

Dari segi kebutuhan berbagai sektor, baik rumah tangga maupun kebutuhan sektor bisnis dan industri, pengelolaan sampah di Kota Batam tidak kurang pentingnya dibandingkan sektor-sektor pelayanan publik lainnya. Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Secara kategoris, sampah dipilah menurut sampah organik maupun anorganik. Sedangkan dari sifat sampah padat terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Dapat dipahami bahwa sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam dapat mencakup pengertian luas.

Dari segi tujuan, pengelolaan sampah pada hakikatnya diharapkan akan mewujudkan pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Bukan rahasia lagi bagi berbagai pihak bahwa pengelolaan sampah yang buruk akan menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Jika pengelolaan sampah belum memenuhi norma-norma penyelenggaraan pelayanan yang baku, maka dapat dipahami bahwa pemerintah kota, khususnya instansi-instansi terkait masih belum melakukan tugas pokok dan fungsi pokoknya dengan kinerja yang baik. Pengelolaan sampah yang baik ialah didasarkan pada asas: a. harmoni, dan kelestarian lingkungan; b. tanggung-jawab; c. berkelanjutan; d.

manfaat; e. keadilan; f. kesadaran; g. kebersamaan; h. kesehatan; i. keamanan; dan j. nilai ekonomi.

Sedangkan dari sisi pengaturannya, dengan pengelolaan sampah yang baik diharapkan akan mewujudkan budaya hidup bersih, indah dan sehat bagi seluruh masyarakat; lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; dan meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Dilihat dari kesiapan aparatur Pemerintah Kota Batam yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, maka pengelolaan sampah hendaknya diwujudkan menurut norma-norma penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik. sekurang-kurangnya akan mencakup a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; c. pemanfaatan kembali sampah; d. pemilahan sampah; e. pengumpulan sampah; f. pengangkutan sampah; g. pengolahan sampah; h. pemrosesan akhir sampah; dan i. Pendanaan.

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan tujuan a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, c. meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di daerah dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah. Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan prinsip a. keterpaduan, b. akuntabilitas, c. transparansi, d. efisiensi, e. efektifitas; dan kepastian hukum

Secara teknis, kegiatan pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah (*reduce*); pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Aktivitas yang diharapkan merupakan upaya pengelolaan

sampah yang baik ini diberi singkatan sebagai 3 R. Tidak semata-mata istilah, maka semboyan di atas telah diangkat menjadi rangkaian program ataupun sebagai program Pemerintah Kota Batam. Sejumlah unit setara dinas dilibatkan di dalam pengelolaan sampah ini. Dalam kaitannya dengan merujuk pada norma yang sudah semakin baku dalam berbagai kebijakan pengelolaan sampah, maka peran serta masyarakat dapat terwujud. Oleh sebab itu, unit-unit sampai tingkat Kelurahan turut serta berperan di dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik.

Pengelolaan sampah sudah merupakan kebijakan pemerintah. Kebijakan-kebijakan pemerintah/publik terkait dengan pengelolaan sampah terus menerus diperbaharui, serta ditingkatkan cakupannya. Pemerintah telah mencanangkan pelayanan atas pengelolaan sampah dan menetapkannya sebagai salah satu tugas dan wewenang Pemerintah. Hal itu dituangkan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selanjutnya dua turunan kebijakan yang merupakan kebijakan operasional (policy instrument) ialah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Bagi pemerintah Kota Batam sebagai kota industri, pengelolaan sampah tidak saja dimaksudkan supaya terlaksana dengan baik, namun juga diharapkan agar pengelolaan sampah padat (solid waste). dapat terintegrasi dan optimal. Untuk itu Pemerintahan Kota Batam telah mengulirkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan daerah Kota Batam No 11 Tahun 2013 Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan

sampah meliputi, menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah, dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah di setiap daerah dan wilayah.

Sebagaimana dikemukakan di dalam kebijakan-kebijakan terkait, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Jelas atas dasar rumusan ini, limbah cair tidak dikategorikan sebagai sampah padat.

Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Batam dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan dukungan Dinas Tata Kota dan Pertanaman, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sedangkan pada tingkat operasional, pengelolaan sampah tidak lepas dari peranan Kecamatan sebagai unit terdepan dalam melayani masyarakat. Pengelolaan sampah Kota Batam di bawah pelaksana kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam diarahkan kepada setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam untuk diberikannya wewenang mengelolanya secara masing-masing.

Secara kelembagaan, pengelolaan sampah telah merupakan kewajiban pemerintah, baik pusat dan daerah. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pengelolaan sampah akan menjadi tanggung-jawab para pemimpin dan manajer pemerintahan. Namun demikian, karena sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia, maka dinamika kehidupan warga kota sebagai manusia biasa sangat mempengaruhi berbagai implementasi kebijakan pelayanan di bidang persampahan. Oleh sebab itu, dimensi dinamika warga sebagai pihak yang memperoleh pelayanan dari pemerintah dalam hal pengelolaan sampah menjadi hal penting untuk diperhatikan masyarakat.

Unsur masyarakat dalam hal ini rumah tangga adalah pembuat sampah diharapkan dapat berperan penting di dalam mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Masyarakat dilayani oleh jajaran pemerintahan terdepan, yakni Kecamatan. Namun demikian, dalam hubungannya dengan rumah tangga, penyediaan jasa layanan-layanan publik pada hakikatnya disambungkan oleh lembaga kewargaan yang dikenal sebagai Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga. (RT) Secara filosofis, kedua lembaga ini (RW dan RT) dapat dikatakan merupakan representasi partisipasi warga dalam penyelenggaraan

pelayanan kepada warga. Oleh sebab itu lembaga RW dan RT adalah lembaga-lembaga yang mempunyai peran signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Salah satu contoh permasalahan kasus penanganan dan pengelolaan sampah yang terjadi yakni di Kota Batam. Perkembangan penduduk Kota Batam semakin meningkat akibat urbanisasi. Kota Batam berkembang menjadi metropolitan karena meningkatnya pembangunan di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, pelayanan jasa, dan lain-lain. Kota Batam yang jaraknya berdekatan dengan negara Singapura sebagai pusat perdagangan negara-negara dunia, warga Singapura termasuk dalam industri wisata mendapatkan 78% dari sekitar 2 juta wisatawan yang berkunjung ke Batam dapat dilihat sebagai penyangga Kota Batam khususnya dalam industri wisata memiliki peran yang besar termasuk dalam permasalahan perkotaan yaitu sampah.

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menunjukkan bahwa sampah perkotaan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan yang dialami oleh pemerintah Kota Batam dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada daerah-daerah yang belum terjangkau akses untuk pengambilan sampah industri rumah tangga. Hal ini berarti untuk mencapai akses pengambilan sampah pada wilayah yang belum bisa dimasuki oleh truk pemungut sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah di sepanjang jalan Kota Batam.

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah yang di hasilkan. Peningkatan jumlah

sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi kompleks, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain.

Salah satu masalah yang paling sering terjadi di kota yang memiliki jumlah penduduk melebihi satu juta jiwa adalah permasalahan sampah. Masalah pengelolaan sampah di setiap daerah merupakan salah satu masalah yang kompleks, karena kurangnya pengertian masyarakat terhadap akibat-akibat yang dapat ditimbulkan oleh sampah kedepannya. Faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di setiap daerah semakin kompleks adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan dan pengetahuan tentang bagaimana mengelola sampah dan juga ikut berpartisipasi untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya .

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume pembuangan sampah masyarakat, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dampak peningkatan aktivitas manusia menjadi lebih lanjut mengakibatkan bertambahnya sampah. Jika tidak diimbangi dengan melakukan kebijakan bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam, cepat atau lambat Kota Batam akan menjadi kota yang penuh dengan sampah.

Hal ini juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan perkotaan karena disebabkan oleh kurangnya pengelolaan persampahan yang tidak memadai. Oleh sebab itu, perlu dilaksanakan suatu tindakan atau cara untuk

mengatasi masalah sampah tersebut sehingga fenomena sampah yang selama ini terjadi pada kota tidak menjadi masalah yang serius bagi warga masyarakat perkotaan maupun masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi, bahwa masalah persampahan telah mengakibatkan pencemaran lingkungan secara berantai, seperti bau yang tidak enak dan mengganggu, sumber penularan penyakit, tersumbatnya drainase dan sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Salah satu permasalahan sampah yang cukup mendasar adalah permasalahan pada hasil sampah rumah tangga, sebab selain jumlahnya yang relatif banyak, sampah rumah tangga juga mempunyai problematik tersendiri.

Permasalahan sampah rumah tangga yang terjadi di Kota Batam ditimbulkan oleh masih kurangnya armada pengangkut atau pengumpul sampah yang di akses untuk masuk keperumahan warga agar dapat mengambil sampah yang ada diperumahan warga setiap harinya, sehingga tidak terjadi penumpukan di daerah perumahan. Aktivitas masyarakat yang kurang baik dalam pengelolaan sampah rumah tangga juga menjadi faktor terjadinya sampah rumah tangga menjadi salah satu penghasil sampah terbesar di Kota Batam.

Sampah-sampah hasil produksi manusia biasanya bersifat organik (teruraikan) dan bersifat anorganik (tidak terurai). Sampah-sampah ini kemudian selalu berakhir pada tempat-tempat sampah. Baik di setiap rumah tangga, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, industri, rumah sakit dan lain sebagainya. Sampah-sampah itu, kemudian diangkut oleh para pekerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan untuk dipindahkan ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Namun tidak semua sampah tersebut dapat terangkut dengan baik oleh para pekerja Dinas Lingkungan Hidup ke TPA yang disediakan. Biasanya sampah-sampah yang tidak terangkut selalu saja terlihat berserakan atau tertumpuk di pinggir-pinggir jalan, sudut-sudut gang, di lahan kosong, di pinggir sungai atau bahkan di sungai itu sendiri. Selain dikarenakan tidak terangkut oleh pekerja Dinas Kebersihan Kota, biasanya sampah-sampah yang bertebaran di sudut-sudut jalan dan dipinggir sungai juga dikarenakan faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang mereka timbulkan sendiri.

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup serta dikelola secara langsung oleh setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam serta juga masyarakat secara langsung belum dapat berjalan secara optimal. Jika pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal tentu akan berdampak pada munculnya masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Pada tatanan kesehatan misalnya, dampak yang dihasilkan dari pengelolaan sampah yang tidak baik akan memunculkan banyak penyakit seperti diare, tifus dan DBD. Sedangkan pada tatanan lingkungan, khususnya bagi sampah yang masuk ke drainase atau sungai akan mencemari ekosistem air yang beradampak pada berubahnya ekosistem perairan secara biologi dan juga menyebabkan terjadinya banjir.

Pengelolaan sampah di Kota Batam acap kali dijadikan sebuah permasalahan yang tak bisa kunjung selesai diatasi oleh pemerintah Kota Batam itu sendiri. Karena dinilai sering mengalami kerusakan dan tidak menyediakan peralatan yang memadai sehingga mengakibatkan pengambilan sampah di perumahan menjadi terhambat. Namun tidak semua permasalahan sampah

diakibatkan oleh kurangnya pemerintah untuk mengelola sampah, akan tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah pendidikan, pendapatan, kepedulian terhadap sampah, peraturan, kondisi lingkungan dan fasilitas.

Masih kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan juga menjadi faktor yang acap kali berujung kepada membuang sampah yang bukan pada tempatnya. Masih banyak bisa dilihat sampah-sampah yang berserakan dipinggir jalan akibat masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah rumah tangganya pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.

Maka dari latar belakang masalah diatas, peneliti ingin melihat bagaimana peran dari pemerintah dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah masyarakat di Kecamatan Bengkong Kota Batam berdasarkan dari peraturan daerah Kota Batam No 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Secara mendalam, permasalahan sampah yang ada di Kecamatan Bengkong Kota Batam dengan cara “Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam”

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya pengelolaan sampah telah menjadi salah satu layanan publik, terutama setelah diimplementasikannya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dan berbagai regulasi sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik diatur dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebelumnya, penyelenggaraan pelayanan publik secara eksplisit diberikan pedoman berupa pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik (SK Menteri Pendayaangunaan Aparatur

Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang ditanda-tangan Feisal Tamim. Di dalam SK Menteri tersebut disebutkan bahwa hakekta pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Dalam KepMenPAN Nomor 63 Tahun 2003 kelompok pelayanan publik disebut ada tiga, yakni:

- kelompok pelayanan administratif,
- kelompok pelayanan barang, serta
- kelompok pelayanan jasa.

Berkaitan dengan pengelompokan di atas, pengelolaan sampah masuk pada kategori pelayanan ketiga, yakni pelayanan jasa. Pemerintah menyelenggarakan sebagian dari pengelolaan sampah, dan sebagian lagi diharapkan sebagai peran serta warga. Partisipasi warga dapat mencakup keterlibatan dan pembuatan kebijakan dan dapat pula berupa tindak langsung pelaksanaan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan-pelayanan publik, pengaturan berbagai penyelenggaraan layanan merujuk pada berbagai penyelenggara pemerintahan, penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan di masing-masing kota pada hakikatnya adalah kesatuan wilayah pemerintahan, yang unit pemerintahan tidak terdapat lagi badan perwakilan rakyat di daerah tingkat dua. . Artinya sifat pemerintahan di tingkat kota/kabupaten adalah sebatas unsur penyelenggara dari kebijakan-kebijakan publik yang diputuskan di tingkat provinsi.

Dalam lima tahun terakhir ini pengelolaan sampah—yang mestinya sebagian sudah dilakukan dengan berbagai aksi seperti aksi 3R pada hakikatnya masih berlangsung secara sporadik. Sebagian dari upaya 3R pada hakikatnya

dilaksanakan pada tingkat rumah tangga, lingkungan Rukun Tetangga dan lingkungan Rukun Warga. *Reduction, Reuse* dan *Recycle* mencerminkan inisiatif partisipasi. Partisipasi mempunyai cakupan yang luas. Untuk mengatasi keterbatasan alokasi anggaran yang tersedia, aparat pemerintah termasuk di tingkat Kecamatan cenderung melakukan tindakan/aksi kreatif untuk mendorong partisipasi warga. Semua RW dan RT di Kota Batam menerapkan aksi yang relatif sama.

Kota Batam merupakan salah satu daerah yang dikelilinginya berbatasan dengan lautan dan memiliki daratan yang tidak cukup besar. Apabila pemerintahan Kota Batam tidak melakukan hal yang objektif dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, maka akan terjadi penumpukan sampah di Kota Batam dan kedepannya semakin bertambah dan Kota Batam menjadi Kota Sampah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, khususnya di Kecamatan Bengkong?
2. Bagaimana partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (research question), adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah Kecamatan Bengkong Kota Batam

2. Mengevaluasi bentuk partisipasi masyarakat menurut latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang di laksanakan di Kecamatan Bengkong.
2. Bagi kalangan akademisi, sebagai acuan literatur yang dapat membantu pada penelitian dan penulisan selanjutnya, sekaligus dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bagi penulisan ilmiah terkait mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah .
3. Bagi pembaca, sebagai gambaran untuk implementasi pelaksanaan mengenai pengelolaan sampah di Indonesia.
4. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batan dan terkhusus untuk Kecamatan Bengkong, hasil dari penelitian ini bisa diambil dalam penerapan kebijakan kedepannya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dibahas tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran tesis ini. Adapun tinjauan pustaka meliputi eksplorasi teori implementasi kebijakan publik, teori-teori pelayanan publik dan teori serta konsep partisipasi publik. Sedangkan pada bagian kerangka pemikiran, peneliti merumuskan garis-garis besar pemahaman peneliti atas teori dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

A. Implementasi Kebijakan Publik

Pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah selaku penyelenggara pelayanan-pelayanan publik oleh karena itu pengelolaan sampah diatur oleh undang-undang dan peraturan daerah sehingga merupakan kebijakan publik. James E. Anderson (2011:209) mengatakan bahwa implementasi kebijakan ialah *“what happens after a bill becomes a law”*. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan publik. Riant Nugroho (2011), mengatakan bahwa keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul. Kebijakan publik dihasilkan dari suatu sistem politik. Tetapi menurut Nugroho, jika sistem politik demokratis tidak mampu mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul, maka (sistem itu) tidak ada gunanya. Dia mengatakan bahwa kebijakan publik adalah output paling nyata dan paling utama dari setiap sistem politik.

Dalam perspektif yang sama Thomas Dye (2011) mengatakan bahwa *public policy is whatever governments choose to do or not to do*. Definisi ini

mengandung makna bahwa kebijakan publik adalah pilihan yang ditentukan pemerintah. Sedangkan menurut perspektif kelembagaan, James E Anderson (2011:7) mengatakan: *public policies are developed by governmental bodies and officials*. Anderson menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan publik dibuat oleh badan-badan pemerintahan dan pejabat-pejabat. Dalam konteks negara demokratis, penyelenggara tugas baik pada badan-badan pemerintah maupun pejabat-pejabatnya dipilih menurut prinsip-prinsip demokratis. Lebih jauh, Harold Laswell & Abraham Kaplan, sebagaimana dikutip oleh Miftah Thoha (2008:107) mengatakan bahwa: "... *policy as a projected program of goals, value, and practices*". Terandung makna bahwa kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada hakikatnya mengandung tujuan-tujuan, nilai dan serangkaian praktik-praktik yang diharapkan untuk direalisasikan. Dengan demikian (i) pemerintah memilih untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam arti kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. (ii) kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi non pemerintah/partikelir, dan (iii) kebijakan publik merupakan tujuan, nilai dan aturan-aturan pelaksanaan-pelaksanaan untuk mencapai tujuan itu.

Mengutip Anderson, Winarno (2012:24) menerangkan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Anderson, konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi, yaitu *pertama*, kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku yang bersifat acak (*random*). Kebijakan publik secara luas dalam sistem

politik modern bukanlah kejadian-kejadian yang bersifat kebetulan, melainkan 'sesuatu' yang direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. *Kedua*, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri. Kebijakan mencakup tidak hanya keputusan-keputusan kebijakan, namun termasuk keputusan-keputusan yang menjadi rujukan pelaksanaannya. *Ketiga*, Kebijakan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perekonomian, pasar perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mendorong pengadaan rumah bagi warga, dan bukan apa yang dijanjikan atau diinginkan oleh pemerintah. *Keempat*, kebijakan publik dapat bersifat positif atau negatif. Kebijakan publik mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk memengaruhi suatu masalah tertentu agar mewujudkan hal-hal yang positif. Secara negatif, kebijakan publik dapat mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan tertentu.

Kebijakan publik pada hakikatnya merupakan tindakan kolektif (*collective action*) yang diyakini oleh para pakarnya sebagai alat atau instrumen yang paling efektif untuk memecahkan masalah—masalah yang dihadapi masyarakat ketika mekanisme pasar gagal memecahkan masalah bersama (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 34-35). Meskipun demikian, kebijakan publik dapat dirumuskan oleh badan-badan terkait menurut keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat diselesaikan dengan tindakan tertentu yang disepakati bersama oleh para aktor kebijakan.

Kebijakan publik berisi sebuah atau serangkaian pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R Dye (2011), kebijakan publik bukanlah satu atau sejumlah maksud pemerintah, atau bahkan bukan mengenai janji-janji pemerintah. Lebih jauh, keputusan-keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

1. Konsep Teori Implementasi Kebijakan

Berbagai kegagalan implementasi kebijakan/program pemerintah sebagaimana yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan di Indonesia diakibatkan oleh para pelaksanaan kebijakan publik yang melakukan kegiatan tersebut. Bentuk dari permasalahan tersebut dapat diwujudkan melalui inisiatif untuk memahami bagaimana proses implementasi kebijakan/program sesungguhnya berjalan melalui pemahaman yang lebih tentang bagaimana proses implementasi yang dilakukan secara akurat diharapkan akan dapat merumuskan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses implementasi yang lebih baik, sehingga di masa-masa mendatang implementasi suatu kebijakan akan lebih memiliki peluang tingkat keberhasilannya lebih baik lagi.

Untuk dapat mendalami proses implementasi maka perlu untuk dipahami konsep implementasi terlebih dahulu. Penggunaan implementasi mulai muncul kepermukaan beberapa dekade yang lalu. Yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Harold Laswell (1956) dalam Erwan Agus dan Dyah ratih 2015:15 Laswel menggagas suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy process approach*). Menurutnya agar ilmuan dapat memperoleh

pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diurai menjadi beberapa bagian sebagai tahap-tahapan yaitu, agenda setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Edward III dalam Subarsono, 2011: 90-92 berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Beberapa juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Larry N. Gerston (2000) dalam Muh. Irfan Islamy mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “*public policy making is the combination of basic decisions, commitments, and action made by those who hold or affect government positions*” (kebijakan publik adalah gabungan dari berbagai keputusan komitmen, dan tindakan yang dibuat dilaksanakan oleh mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan atau yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan itu sendiri).

Menurut Erwan Agus dan Dyah ratih 2015-21, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan dari kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu untuk mewujudkannya.



Bagan 2.1
Implementasi sebagai delivery mechanism policy output.

Dapat dilihat bahwa dari pandangan Gerston kebijakan publik bukan hanya berisi dari serangkaian keputusan melainkan juga komitmen dan tindakan yang nyata dari mereka yang terlibat dari pemerintahan. Hal ini bisa dimaknai bahwa mereka yang membuat keputusan haruslah mempunyai komitmen yang kuat atas keputusan yang telah dibuatnya, bahwasanya keputusan yang dibuat secara benar, berisi substansi yang sangat bagus sesuai dengan kepentingan

masyarakat dan dapat dilaksanakan dalam bentuknya yang nyata menuju ketujuan yang diinginkan.

Dalam konsep teori kebijakan publik yang akan menjadi landasan analisis dalam penelitian ini menurut Erwan Agus dan Dyah ratih 2015-21 yang menyatakan kebijakan publik itu kebijakan yang dibuat untuk mengeluarkan kebijakan yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran yaitu masyarakat yang sebagai target dari kebijakan yang akan di keluarkan. Tujuan dari sebuah kebijakan adalah diharapkan manakala kebijakan yang di buat dapat menghasilkan keberhasilan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam konsep kebijakan publik ini dimana kebijakan tersebut berawal dari *policy output* (kebijakan Keluar), *delivery* (menyampaikan kebijakan), target group (kelompok sasaran dalam kebijakan), implikasi (keterlibatan kelompok sasaran kebijakan) dan *policy outcome* (masukan bagi kebijakan yang harus di lakukan perubahan).

2. Perumusan Kebijakan Publik.

Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi fomulasi kebijakan publik sebagai berikut:

Menurut Dunn (2000:132), perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Winarno (2002:29) menyatakan bahwa masing-masing alternatif bersaing untuk di pilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah. Tjokroamidjojo dalam Islamy (2000:24) menyebutkan perumusan

kebijakan sebagai alternatif yang terus menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan

Berdasarkan pengertian pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Kemudian menurut Islamy dalam buku Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara (2000:77-101) mengemukakan pendapatnya bahwa ada empat langkah dalam proses pengambilan kebijakan publik, yaitu:

a. Perumusan Masalah (defining problem).

Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat disusun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat

berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya

b. Agenda Kebijakan

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan perhatian pemuat kebijakan menyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum masalah-masalah berkompetensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lain yang pada akhirnya akan masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat pentingnya status agenda kebijakan dalam formulasi kebijakan publik.

c. Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk memecahkan Masalah

Setelah masalah-masalah publik didefinisikan dengan baik dan para perumus kebijakan sepakat untuk memasukan masalah tersebut ke dalam agenda kebijakan, maka langkah selanjutnya adalah membuat pemecahan masalah. Menurut Winarno (2002:83) dalam tahap ini para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif pilihan kebijakan untuk memecahkan masalah tersebut.

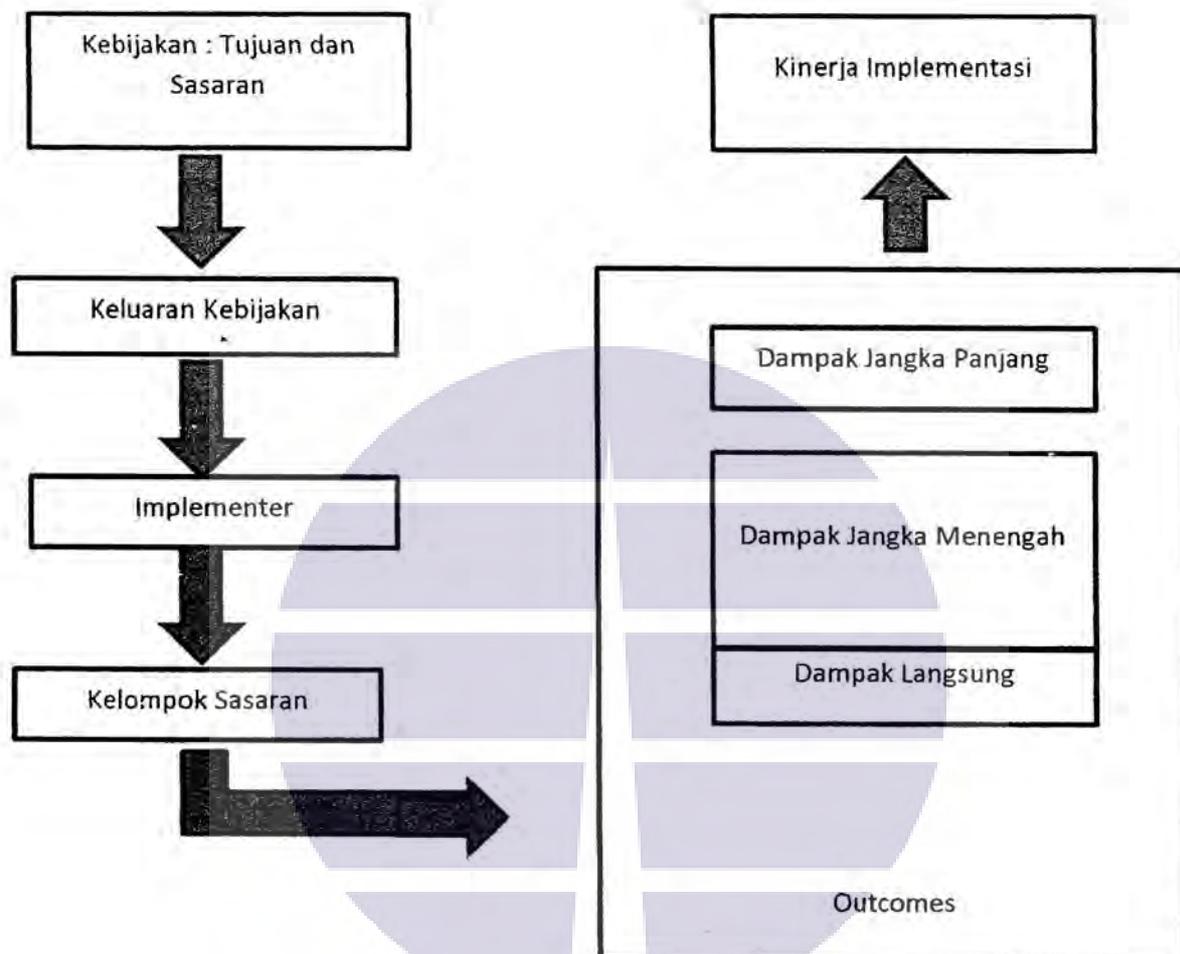
d. Tahap Penetapan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan

tidak dapat dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan.

Menurut Islamy (2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan penerimaan secara bersama terhadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-ukuran yang diterima. Pada tahap ini para aktor berjuang agar alternatifnya yang diterima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan kebijakan dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan sebagainya.

Proses implementasi berawal dari adanya suatu kebijakan atau program. Pada dasarnya suatu program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan (*policy input*). Masukan kebijakan yang umumnya dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan.



Bagan 2.2 Proses Implementasi

Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab, 2001:68) arti implementasi kebijakan adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin di capai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.

Sedangkan menurut teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agostino, 2006:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Adapun implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
- b. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
- c. Adanya hasil kegiatan

Dalam beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep implementasi kebijakan mengarah pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna merahi dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (out put) maupun sebagai hasil.

Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winamo (2005), proses implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forthe in prior decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu individu/pejabat-pejabat/ kelompok - kelompok pemerintah atau swasta yang

diarahkan pada tercapainya tujuan –tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan).

Grindle dalam Abdul Wahab (2001), implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan–keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

3. Model Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model kebijakan publik pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal dengan *implementation as a political and administrative process*. Dimana menurut Grindle ada dua *variable* yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

- a. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcome*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin didapatkan. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:
 - Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada kasi kebijakan itu sendiri.
 - Apakah tujuan itu bisa tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu, dampak dan efeknya pada masyarakat secara

individudan kelompok tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

- b. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari, isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

Dalam keberhasilan implementasi yang dilihat dari isi kebijakan mencakup beberapa aspek yang bisa mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. Type of benefits (tipe manfaat)

Pada point ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Sebagai contoh, masyarakat di wilayah pesisir area lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan dari pada menerima program kredit sepeda motor

- c. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai).

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.. Suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin

- d. Site of decision making (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- e. Program implementer (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci

- f. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan)

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

Sedangkan keberhasilan implementasi yang dilihat dari lingkungan implementasi (context of implementation) yang mencakup pada :

- a. Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para actor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- b. Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

B. Pengertian Pelayanan publik

Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu ukuran yang dewasa ini lazim digunakan untuk menganalisis pelayanan publik ialah Standar Kualitas Minimum. Menurut Goetsch & Davis dalam Tangkilisan (2003:209), kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dari pengertian tersebut, kualitas mengandung elemen-elemen yang meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, yang mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, serta merupakan kondisi yang selalu berubah. Adapun definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*).

Pada prinsipnya, konsep kualitas memiliki dua dimensi, yaitu dimensi produk dan dimensi hubungan antara produk dan pemakai. Dimensi produk memandang kualitas barang dan jasa dari perspektif derajat konformitas dengan spesifikasinya, yaitu perspektif yang memandang kualitas dari sosok yang dapat dilihat, kasat mata, dan dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan dan pengamatan.

Sedangkan perspektif hubungan antara produk dan pemakai merupakan suatu karakteristik lingkungan di mana kualitas produk adalah dinamis, sehingga produk harus disesuaikan dengan tuntutan perubahan dari pemakai produk (Tjiptono dalam Tangkilisan, 2003:209-210).

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kata kualitas sendiri mengandung banyak pengertian, beberapa contoh pengertian kualitas menurut Fandy Tjiptono (1995:20) adalah:

“(1) Kesesuaian dengan persyaratan, (2) Kecocokan untuk pemakaian, (3) Perbaikan berkelanjutan, (4) Bebas dari kerusakan/cacat, (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat, (6) Melakukan segala sesuatu secara benar, (7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.”

Untuk dapat menilai sejauh mana kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat, perlu ada kriteria yang menunjukkan apakah suatu pelayanan publik yang diberikan dapat dikatakan baik atau buruk, berkualitas atau tidak. Umumnya yang sering muncul di mata publik adalah pelayanan yang diberikan para petugas pelayanan. Petugas pelayanan merupakan ujung tombak terdepan yang berhadapan langsung dengan publik.

Boediono (2003:113) menyatakan bahwa “ kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Pengertian kualitas dapat diartikan sebagai kinerja untuk standar yang diharapkan oleh pelanggan. Kualitas pelayanan memiliki arti yang tidak hanya

memuaskan pelanggan, tetapi menyenangkan pelanggan, memberikan inovasi kepada pelanggan, dan membuat pelanggan menjadi kreatif.

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau birokrasi untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Istianto, 2011: 121). Menurut Oxford Dictionary b (dalam Subarsono, 2006:66), pengertian *service* didefinisikan sebagai “*a system that provides something that the public needs, organized by the government or a private company*”. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelayanan berfungsi sebagai sebuah sistem yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara istilah publik yang berasal dari bahasa Inggris (*public*), terdapat beberapa pengertian, yang memiliki variasi arti dalam bahasa Indonesia, yaitu umum, masyarakat, dan negara. Dalam hal ini, pelayanan publik merujukkan istilah publik lebih dekat pada pengertian masyarakat atau umum.

Hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum (pelayanan oleh pemerintah/pemerintah kepada masyarakat luas), antara lain (Ibrahim, 2008:19):

- a. Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (lembaga) pemerintahan di bidang pelayanan umum.
- b. Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan sistem dan tatalaksana pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

- c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sistem pelayanan publik terdiri atas empat faktor (Istianto, 2011:123): *pertama*, sistem, prosedur dan metode; yaitu dalam pelayanan publik terdapat sistem informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan, *kedua*, personil, yakni aparatur; dalam pelayanan publik aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik, *ketiga*, sarana dan prasarana; dalam pelayanan publik diperlukan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan publik misalnya ruang tunggu, tempat parkir yang memadai, *keempat*, masyarakat sebagai pelanggan; dalam pelayanan publik masyarakat sebagai pelanggan sangatlah heterogen baik tingkat pendidikan maupun perilakunya.

Pada dasarnya, pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itu, setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut (Ibrahim, 2008:19-20):

- a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.

- c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka instansi/lembaga pemerintah/pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Konsep kualitas pelayanan dapat dipahami melalui perilaku konsumen (*consumer behavior*), yaitu suatu perilaku yang dimainkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Ibrahim (2008:22), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilai kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.

Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan suatu perusahaan. Pada gilirannya kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada perusahaan yang memberikan kualitas yang memuaskan.

Ciri-ciri atau atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono (1995, 25) antara lain adalah:

1. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
2. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan;
4. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
5. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan lain-lain;
6. Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-AC, kebersihan dan lain-lain.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Publik

Kasmir (2006:3), menyatakan bahwa dalam pemberian pelayanan yang optimal kepada pelanggan harus dilakukan sungguh-sungguh dengan memperhatikan faktor-faktor utama dan faktor-faktor pendukung antara lain adalah :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (karyawan) dalam melayani pelanggan merupakan faktor utama karena hanya dengan manusia pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.

b. Faktor Sarana dan Prasarana (Fisik)

Faktor ini sangat mendukung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Faktor sarana dan prasarana seperti kenyamanan ruangan yang meliputi: ruangan yang lebar, pendingin udara yang cukup, penyusunan meja kursi yang rapi dan artistik, yang membuat suasana menjadi nyaman.

c. Faktor Kualitas Produk

Faktor Kualitas Produk yang dimana produk yang disajikan seperti ragam produk atau jenis produk yang dijual lengkap, mutu atau isi produk berkualitas tinggi dan disesuaikan.

Ketiga faktor tersebut diatas ini harus saling mendukung satu sama lainnya. Apabila salah satu faktor diabaikan, kualitas pelayanan yang diberikan menjadi berkurang nilainya.

Pada aspek kinerja pelayanan, perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja menjadi bagian yang berkelanjutan pada kinerja pelayanan. Kualitas pelayanan yang diberikan tergantung dari siapa yang memberikan pelayanan. Kinerja pelayanan menjadi sebuah proses yang tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab aparatur. Tujuannya adalah untuk mengukur kualitas yang telah dilakukan oleh aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran kinerja menjadi referensi untuk mengetahui kualitas kinerja aparatur yang disertai dengan barometer terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kualitas pelayanan publik dapat pula dilihat dari kinerja aparatur. Kualitas yang baik, tentunya dikerjakan oleh aparatur yang baik dan berkualitas, kompeten dan tentunya professional. Pengukuran kinerja menjadi indikator penting dalam

penilaian kinerja. Penilaian kinerja dalam pelayanan publik bersifat objektif sehingga penilaiannya konkret dan komprehensif (Hayat, 2017).

Sejumlah faktor diidentifikasi oleh para pakar sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik. Subarsono (2005: 87), menyatakan bahwa meskipun suatu kebijakan telah direkomendasikan oleh *policy makers* namun rekomendasi tersebut tidak menjamin kebijakan tersebut berhasil diimplementasikan. Terdapat sejumlah variabel yang mempengaruhi sukses tidaknya implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Winarno (2012), bahwa kompleksitas implementasi bukan hanya ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga oleh adanya proses implementasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks. Variabel-variabel tersebut tidak hanya variabel yang melekat kepada organisasi atau institusi. Namun yang semakin memperoleh perhatian dari kalangan peneliti ialah menyangkut dimensi-dimensi manusianya.

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor. Masing-masing variabel tersebut saling berkorelasi satu dengan lainnya. Menurut George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2012:90-92), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel, yaitu: *Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi*.

Sementara itu, keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan. (*context of implementation*).

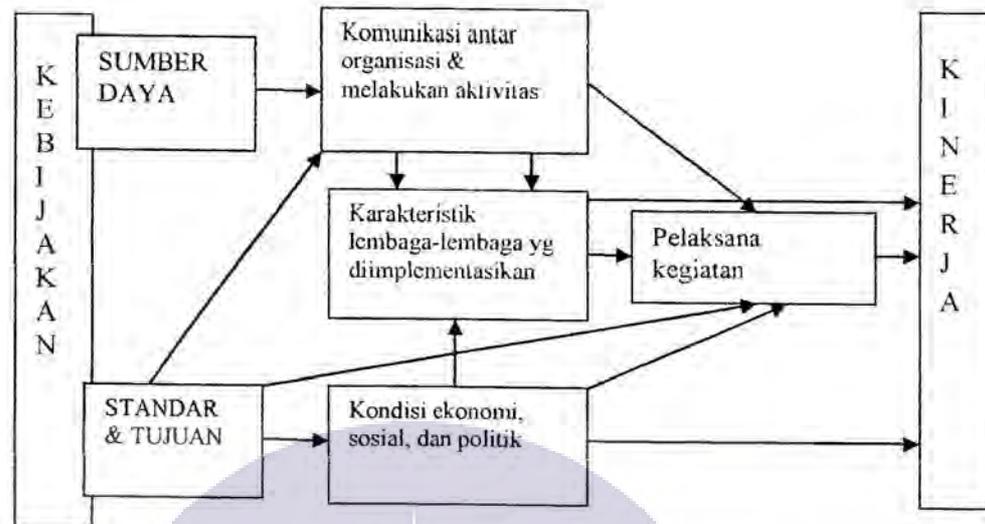
Adapun yang cenderung terdapat pada suatu kebijakan antara lain adalah:

- Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- Jenis manfaat yang akan dihasilkan kebijakan ;
- Derajat perubahan yang diinginkan;
- Kedudukan pembuat kebijakan;
- Pelaksana program;
- Sumber daya yang dikerahkan.

Setiap kebijakan akan memengaruhi keadaan tertentu. Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- Seberapa besar derajat kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Masih dalam cakupan makna yang sama, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Winarno (2012:159), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi.



Bagan 2.3
Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn
 Sumber: Nugroho, 2008:220

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Nugroho: 2012) Keenam variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Di samping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Namun demikian, dalam banyak kasus kita menemukan beberapa kesulitan besar untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja. Ada dua penyebab yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn untuk menjawab mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. *Kedua*, mungkin akibat dari kekaburan-

kekaburan dari kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran- ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran sasaran suatu program yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.

b. Sumber-sumber kebijakan:

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan kerap menjadi penyebab gagalnya implementasi kebijakan.

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan:

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan—tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar

kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Oleh karena itu, menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil seringkali membutuhkan mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur lembaga. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Para pakar telah mengidentifikasi sejumlah karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Van Meter dan Van Hon mengatakan implementasi kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik—karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terdiri dari ciri-

ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka Van Meter dan Van Horn mengetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- Kompetensi dan ukuran kapasitas staf
 - Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
 - Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif;
 - Vitalitas suatu organisasi;
 - Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
 - Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.
- e. **Kondisi sosial, ekonomi, dan politik**

Lebih lanjut, disebutkan pula bahwa kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel yang diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian badan-badan pelaksanaan.

Untuk itu perlu dipahami jawaban atas sejumlah pertanyaan berikut:

- Apakah sumber-sumber pembiayaan dalam yurisdiksi atau pada organisasi pelaksana tersedia bagi implementasi kebijakan?

- Apakah kondisi-kondisi ekonomi dan sosial akan mengganggu implementasi suatu kebijakan?
- Apakah opini publik tentang kebijakan tertentu 'terkait' dengan kebijakan yang tengah (akan) diimplementasikan ?
- Apakah elit (politik dan sosial) mendukung atau justru menentang implementasi kebijakan?
- Apakah sifat-sifat pengikut dari yuridiksi atau organisasi pelaksana; apakah ada oposisi atau dukungan pengikut bagi kebijakan?
- Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan swasta dimobilisasi untuk mendukung atau menentang kebijakan?

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

f. Kecenderungan Pelaksana (implementor)

Berhasilnya implementasi suatu kebijakan tidak terlepas dari tindak-tanduk pelaksana kebijakan. Terdapat tiga unsur tanggapan pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yaitu: Kognisi (komprehensif, pemahaman) tentang kebijakan, Arah kecenderungan—kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan (penerimaan, netral, penolakan) serta intensitas tanggapan. Implementasi kebijakan akan efektif apabila pelaksana mengetahui betul apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan yang dimiliki adalah merupakan kekuatan yang sesuai

dengan ketentuan-ketentuan diantara petugas mengenai ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan yang bersangkutan. Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan memiliki peranan yang besar dalam implementasi kebijakan, sehingga perlu adanya sebuah pengawasan berkala oleh atasan guna mendapatkan kinerja yang efektif dari para pelaksana. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksana, standar serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap terjaga. Persamaan persepsi diantara pelaksana mengenai standar dan tujuan kebijakan merupakan kelanjutan dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Namun tidak seluruh faktor-faktor dapat digunakan dalam menjawab permasalahan yang dihadapi oleh suatu kebijakan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa bahwa model implementasi tidak perlu diaplikasikan mentah-mentah melainkan dapat disintesis sesuai dengan kebutuhan (Wibawa, 1994:18 dalam Hariyono, 2005:52).

Meskipun kerangka pemikiran di atas menunjukkan secara sistematis hal-hal yang akan menjadi faktor penentu berhasilnya tidaknya suatu implementasi kebijakan, namun merujuk pada pemikiran yang disampaikan oleh Grindle, penulis berpandangan bahwa implementasi kebijakan mempunyai sifat-sifat kompleks.

C. Partisipasi Masyarakat

Konsep partisipasi masyarakat mengandung beberapa pengertian. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di

masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Lebih jauh, Mikkelsen dalam Isbandi (2007) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka

Lebih jauh, Conyers (1991: 154-155) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat, *pertama*, merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa

kehadirannya program pemerintah serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pemerintah jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Partisipasi pada hakikatnya ditandai oleh meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program tertentu. Partisipasi dapat berarti sebagai keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi menurut Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proyek.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang yang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap proses partisipasi tanpa dibatasi oleh jenjang dan struktur sosial masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- d. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- e. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga dengan adanya keterlibatan aktif dalam proses kegiatan, terjadi proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain. Berbagai kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- f. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

D. Pengertian Sampah

Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas keseharian manusia. Apriadji (1989) memberikan definisi mengenai sampah sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun sebagai sisa proses industri. Hadiwiyoto (1983) memberikan ciri-ciri sampah sebagai bahan sisa, baik bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi maupun bahan yang sudah diambil bagian utamanya, dari segi sosial ekonomis sudah tidak memiliki harga, dan dari segi lingkungan merupakan bahan buangan yang tidak berguna dan banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan pada kelestarian lingkungan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, Hadiwiyoto (1983) mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagiannya utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya, yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya, dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

Slamet (2008:155) menyatakan bahwa secara kuantitas maupun kualitasnya, sampah dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat, antara lain:

1. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.
2. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang.
3. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam.

Apriadi (1989) menjelaskan bahwa sampah dapat digolongkan ke dalam empat kelompok, antara lain meliputi: (1) *human excreta* yang merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, meliputi tinja (*faeces*) dan air kencing (*urine*), (2) *sawage* yang merupakan limbah yang dibuang oleh pabrik maupun rumah tangga, (3) *refuse* yang merupakan bahan pada sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga, dan (4) *industrial waste* yang merupakan bahan-bahan buangan dari sisa proses industri.

Teruang dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat Ruang lingkup sampah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Sampah rumah tangga;
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- c. Sampah spesifik.

E. Pengertian Bank Sampah

Satu dari beberapa program pemanfaatan sampah yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dengan pendekatan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle) yang berpusat pada partisipasi masyarakat adalah dengan membentuk bank-bank sampah pada skala lingkungan atau kelurahan di setiap wilayah. Bank sampah merupakan tempat di mana masyarakat menabung sampah yang telah mereka pilah. Sampah-sampah yang mempunyai nilai tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk tabungan sampah yang nantinya dapat dikonversi dalam nilai satuan Rupiah.

Pemanfaatan pengelolaan bank sampah pada masyarakat dapat meningkatkan penghasilan ekonomis bagi masyarakat itu sendiri. Pengelolaan sampah yang baik juga dapat membantu pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang terintegrasi di daerah. Bank sampah merupakan metode yang bisa digunakan untuk meminimalisir pengelolaan sampah di daerah sehingga lebih teratur dan hasil sampah yang telah dipilah sesuai dengan kategori layak di gunakan kembali dan didaur ulang sebagai penghasilan tambahan bagi masyarakat itu sendiri.

Bank sampah adalah satu wujud dari usaha pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 3-R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Di Bank sampah, sistem yang diterapkan adalah sistem mengelola sampah dan menampung, kemudian memilah dan mendistribusikan sampah ke fasilitas pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan. Di sini nilai guna barang yang sudah menjadi sampah dapat ditingkatkan, yang sebelumnya tidak berguna menjadi barang berguna. Selain itu, usaha penampungan dan pengolahan sampah dengan mendistribusikan ke fasilitas pengolahan sampah yang lain atau kepada pihak yang membutuhkan juga bisa membantu pengurangan intensitas pembuangan sampah ke TPS atau TPA.

Dilihat dari pengertiannya, bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.⁵¹ Selain pengertian tersebut, bank sampah juga dapat diartikan sebagai satu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Jadi semua kegiatan dalam sistem bank sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat.

Bank sampah juga dapat juga disebut sebagai suatu institusi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lokal sebagai nasabahnya dalam rangka memaksimalkan nilai sampah. Untuk dapat memberikan pelayanan maka bank sampah harus memiliki kepengurusan yang menerima tabungan warga dan

mencatatkannya dalam pembukuan sampah.⁵³ Mekanisme kerja bank sampah telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomer 13 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse dan recycle melalui Bank Sampah adalah sebagai berikut:

- a) Pemilahan sampah
- b) Penyerahan sampah ke Bank Sampah;
- c) Penimbangan sampah;
- d) Pencatatan;
- e) Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan kedalam buku tabungan;
- f) Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Dari penjelasan di atas, proses pemilahan sampah menjadi satu hal yang penting dalam pengelolaan sampah dengan model bank sampah. Karena pemilahan menjadi satu hal yang penting, maka masyarakat didorong untuk melakukan pemisahan dan pengkelompokan sampah berdasarkan jenisnya sebelum dilakukan penyetoran atau penabungan di bank sampah. Dengan dilakukannya proses pemilahan ini, bank sampah berhasil menciptakan satu budaya baru di tengah masyarakat. Budaya baru tersebut adalah budaya pemilahan sampah sejak dari hulunya (rumah tangga). Tidak hanya budaya dalam pemilahan sampah saja, tetapi juga budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan, di mana lebih menghargai sampah yang bukan hanya sebagai benda yang tidak berguna tetapi menjadi barang sesuatu (benda) yang berharga sehingga tidak lagi dibuang sembarangan.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun rujukan dalam menyusun kerangka teori ini meliputi penelitian/tesis terdahulu, buku teks dan jurnal serta dokumen-dokumen terkait. Dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pengendalian sampah, perlu dilakukan kajian literatur untuk mengetahui hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa, baik tentang implementasi kebijakan publik, pelayanan publik maupun pengelolaan sampah. Studi pustaka ini merupakan eskplorasi teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan. Dengan studi pustaka ini penulis dapat membandingkan serta mengambil intisari penelitian-penelitian sebelumnya. Melalui penelusuran pustaka ini peneliti memilah-milah pokok bahasan menurut struktur suatu kerangka pemikiran.

Hasil penelitian terdahulu terkait dengan pengelolaan sampah yang dibahas dalam tinjauan pustaka ini meliputi penelitian/tesis terdahulu, buku teks dan jurnal serta dokumen-dokumen terkait. Studi pertama tesis adalah berjudul Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi kasus : Pengelolaan Sampah Terpadu Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) Perumahan Pondok Pekayon Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan) oleh Wulan Tri Eka Sasmita. Pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu: pemilahan sampah, pengomposan skala rumah tangga, pengomposan skala kawasan, keterampilan dari limbah atau sampah, penghijauan dan pembibitan serta pembuatan lubang biopori. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi dari

warga Kompleks Perumahan Pondok Pekayon Indah (PPI) dan *stakeholders* demi tercapainya tujuan GPL sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program GPL (gerakan peduli lingkungan) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah GPL antara lain fasilitas yang memadai dari pihak GPL, penyuluhan intens dari GPL kepada warga Kompleks PPI, monitoring dari kader dan fasilitator GPL, dan keterlibatan semua *stakeholders*, baik warga, pemerintah, maupun mitra kerja GPL. Sedangkan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah GPL yaitu faktor waktu, gaya hidup atau kebiasaan, fasilitas yang memadai dari pihak GPL, dan perilaku pemulung.

Program-program GPL yang sudah dilaksanakan selama enam tahun dapat dievaluasi berdasarkan visi GPL yaitu menciptakan Kompleks Perumahan Pondok Pekayon Indah menjadi lingkungan yang bersih, sehat, asri, harmoni dan lestari serta memberdayakan masyarakat dalam bidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Dalam pelaksanaan program GPL, visi dari GPL tersebut sudah tercapai karena adanya perubahan di Kompleks PPI, akan tetapi belum semua warga Kompleks Perumahan PPI sudah ikut berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada ketercapaian tujuan antara visi GPL dengan hasil yang diperoleh. Akan tetapi, manfaat yang sudah dirasakan oleh warga Kompleks Perumahan PPI yang menjadi sasaran program GPL yaitu RW 8, 9, 10 dan 11 sudah dapat terlihat dengan jelas. Manfaat tersebut dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara misi GPL dengan pelaksanaan program GPL.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan didukung data kualitatif. Seluruh data yang dikumpulkan dari penelitian, akan dituangkan ke dalam catatan lapangan yang berisi data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara di lapangan dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung (Sitorus, 1998). Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui metode survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Penelitian survei dilakukan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan Gerakan peduli Lingkungan (GPL).

Adapun penelitian Wulan T E Sasmita (2008) merupakan untuk warga berbasis masyarakat Gerakan Peduli Lingkungan (GPL) terbagi dalam beberapa kegiatan, yaitu: pemilahan sampah, pengomposan skala rumah tangga, pengomposan skala kawasan, keterampilan dari limbah atau sampah, penghijauan dan pembibitan serta pembuatan lubang biopori. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi dari warga Kompleks Perumahan Pondok Pekayon Indah (PPI) dan *stakeholders* lain demi tercapainya tujuan GPL sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah dan bagaimana seluk beluk partisipasi warga dalam proses pengelolaan sampah Kota Batam yang akan saya lakukan studi kasus di Kecamatan Bengkong untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pengelolaan sampah dengan menggunakan pendekatan pada keterlibatan warga di Kecamatan Bengkong sesuai dengan adanya peraturan daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013.

Sedangkan studi yang kedua adalah penelitian tesis bertajuk Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus Sampangan dan Jomblangan, Kota Semarang) oleh Ni Komang Ayu Artiningsih.

Produksi sampah rumah tangga setiap hari semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah produk dan pola konsumsi masyarakat. Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi peningkatan volume sampah tersebut adalah dengan cara: mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Penelitian tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Sampangan dan Jomblang Kota Semarang bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat, (2) menginventarisir tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga, (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang berbasis masyarakat di Sampangan dan Jomblang dapat mereduksi timbulan sampah yang dibuang ke TPA, namun belum optimal dilaksanakan baik dalam pemilahan dan atau dalam pengomposan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Komposisi timbulan sampah di Jomblang terdiri dari: sampah organik 50.75%, plastik 17.14%, kertas 19.42%, kaca/logam 12,70%, sedangkan di Sampangan terdiri

dari: sampah organik 49.52%, Plastik 18.06%, kertas 19.29%, kaca/logam 12,52 %.

Sampah organik yang dimanfaatkan menjadi kompos akan mengurangi timbulan sampah maupun mengurangi beban lingkungan, sedangkan hasil pemilahan selain dapat mengurangi timbulan sampah juga dapat dijual atau dikelola sehingga dapat menambah pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah dimana saya akan menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk mengetahui apakah proses kompos itu ada atau tidak ada dalam rangka pengelolaan sampah di Kota Batam. Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam menggunakan konsep 3R reduce, reuse, recycle yang terdapat pada peraturan daerah Kota Batam No 11 Tahun 2013.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dari Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas atas nama Putri Nilam Sari berjudul "Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam". Pencemaran lingkungan menyebabkan meningkatnya penyebaran penyakit, mengurangi estetika lingkungan, dan berdampak pada pemanasan global di Kecamatan Banuhampu sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan yang berpotensi merusak lingkungan sekitar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan penelitian berjumlah 9 orang. Hasil penelitian menunjukkan belum adanya perencanaan khusus dalam pengelolaan sampah karena tidak adanya tempat pengelolaan sampah. Untuk pelaksanaan pengelolaan sampah, di daerah pinggir kota telah terdapat masyarakat yang

bekerjasama dengan Kota Bukittinggi dan di daerah pedesaan telah ada masyarakat yang mengelola sampah dengan membuat kompos, tetapi sebagian besar sampah masih dibuang sembarangan. Diperlukan perwakilan BPLH untuk memamanajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Banuhampu, membuat Peraturan Daerah khusus sampah, pengembangan metode pengelolaan sampah dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) sehingga jumlah sampah dapat diminimalisir.

Selanjutnya dalam penelitian terdahulu yang dibahas dalam jurnal international oleh RA. Pratama yang berjudul “ Peluang Penguatan Bank Sampah untuk Mengurangi Timbulan Sampah Perkotaan Studi Kasus : Bank Sampah Malang”. Isu persampahan global dilatarbelakangi oleh populasi dunia yang semakin meningkat. Selain itu, peningkatan jumlah timbulan sampah bergantung pada tingkat kemakmuran ekonomi suatu negara. Negara dengan tingkat ekonomi tinggi akan memproduksi sampah yang lebih tinggi daripada negara berkembang(1). Setiap tahunnya, jumlah timbulan sampah di Indonesia selalu meningkat linier dengan pertumbuhan penduduk. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitasnya penduduk yang berarti meningkatnya jumlah timbulan sampah. Selain itu, meningkatnya jumlah timbulan sampah tidak seimbang dengan program pengelolaan sampah seperti tidak bertambahnya jumlah dan luas TPA sampah. Kota Malang merupakan satu diantara kota di Indonesia yang menghadapi masalah tersebut. Adapun pengetahuan yang dipetik penelitian ini ialah isu sampah adalah isu global.

Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang diambil dari Jurnal International atas nama Donna Asteria dan Heru Heruman (2016) yang berjudul

“Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya” Perubahan paradigma masyarakat mengenai sampah perlu dilakukan secara berkelanjutan. Edukasi kesadaran dan keterampilan warga untuk pengelolaan sampah dengan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle dan replant (4R) penting dalam penyelesaian masalah sampah melalui pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Bank sampah yang berbasiskan partisipasi warga perempuan merupakan modal sosial dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Bank sampah yang diintegrasikan dengan prinsip 4R dilaksanakan di Kampung Karangresik, Tasikmalaya, Indonesia.

Kegiatan bank sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Pemberdayaan warga melalui kegiatan penyuluhan, edukasi, pelatihan dengan metode partisipasi emansipatoris (interaksi dan komunikasi), serta dialog dengan warga di komunitas. Selain itu diperlukan dukungan kemitraan dengan membangun jejaring dan mekanisme kerja sama kelembagaan antara warga pengelola bank sampah dengan stakeholder terkait. Bank Sampah Pucuk Resik (BSPR) di Kampung Karangresik ini telah memberikan manfaat kepada warga, terutama manfaat langsung dengan berkurangnya timbulan sampah di komunitas, lingkungan menjadi lebih bersih dan asri, serta kemandirian warga secara ekonomi. Selain manfaat secara ekonomi, dimana dari tabungan sampah memperoleh uang untuk membayar listrik dan membeli sembako, juga terwujudnya kesehatan lingkungan, dengan kondisi komunitas yang lebih bersih, hijau, nyaman, dan sehat. Pengelolaan sampah

terintegrasi dapat menstimulasi kreativitas dan inovasi dari masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga.

Manfaat yang dapat diperoleh penulis atas penelitian Asteria dan Heru Heruman (2016) ialah bahwa memperluas cakupan dengan membahas pengelolaan sampah yang berbasis 3R reduce, reuse and recycle mengacu pada Perda Pengelolaan Sampah di Kota Batam, mulai dari proses pengangkutan pengumpulan dan pengelolaannya.

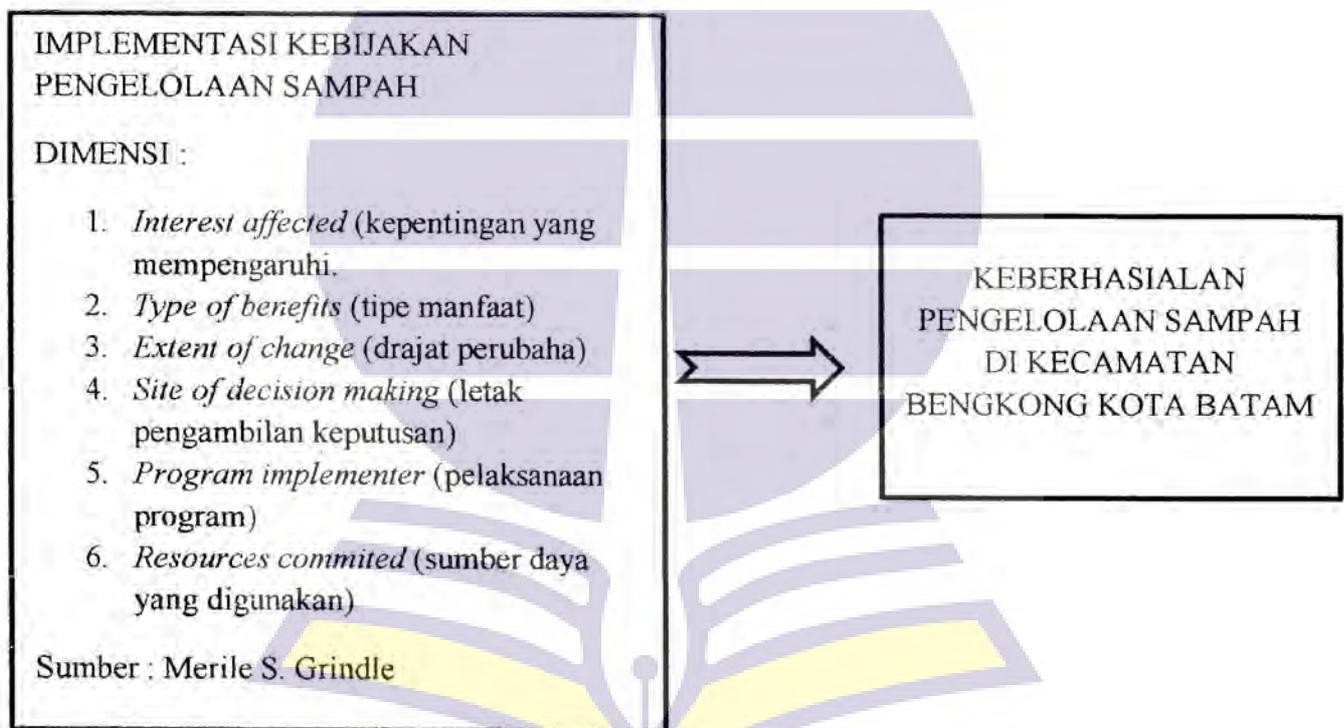
G. Kerangka Konsep.

Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kota Batam memiliki sejumlah dimensi. Kebijakan Pengelolaan Sampah terkait erat dengan sejumlah aspek lain, seperti ketersediaan infrastruktur dan terutama respons warga masyarakat dan sejumlah faktor lainnya. Dari segi penyelenggaraan, pengelolaan sampah di Kota Batam tidak lepas dari tujuan menyeluruh dari pelayanan sektor publik, yakni memberikan pelayanan yang sesuai dan searah dengan kebijakan-kebijakan publik lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Kota Batam No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengelolaan sampah merupakan pelayanan publik yang semakin penting. Terdapat banyak aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Oleh sebab itu dalam kerangka pemikiran ini peneliti berusaha menganalisis bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Beberapa hal berikut merupakan fokus penelitian ini. Pertama sebagai analisis implementasi kebijakan dalam konteks analisis kebijakan. Kedua sebagai

penyelenggaraan pelayanan publik analisis akan merupakan analisis terhadap pengelolaan sampah dalam konteks penyelenggaraan layanan oleh sektor publik. Kemudian yang tak kalah pentingnya di dalam kebijakan pengelolaan sampah pemerintah telah melihat perlunya keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah setempat. Berikut gambar kerangka berfikir dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :



Bagan 2.4 Kerangka Berfikir

H. Defenisi Operasional

Tahapan sosialisasi program adalah tahap penyampaian informasi dan publikasi dari Pemerintah Kota Batam kepada masyarakat Kota Batam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tahapan ini akan dilakukan wawancara kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam atau pejabat

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, Anggota DPRD Kota Batam yang membawahi pengawasan tentang pengendalian lingkungan, melakukan wawancara kepada Camat dan masyarakat Kota Batam.

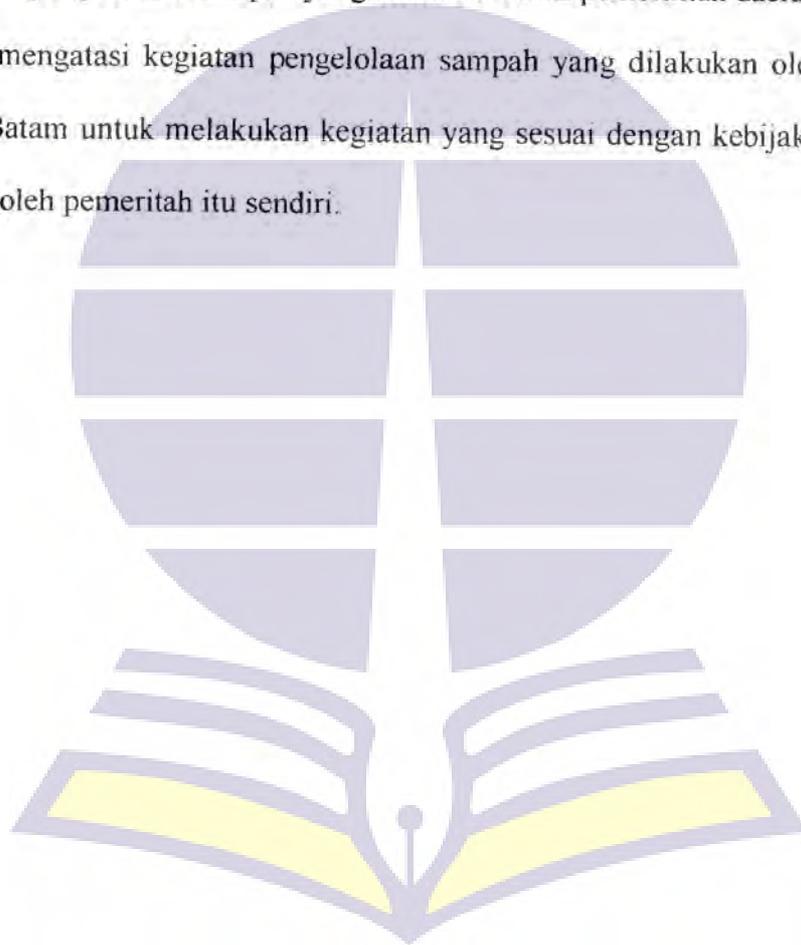
Tahap perencanaan adalah suatu kegiatan yang di rencanakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam secara baik dan benar sekaligus melibatkan keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan dan membuat keputusan terhadap program yang akan dijalankan. Pada tahap perencanaan yang dinilai adalah keterlibatan para pelaksana kebijakan dalam program yang telah ditetapkan agar mencapai tujuan yang di inginkan dan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan secara bersama-sama dengan pemerintahan agar mencapai hasil yang lebih baik lagi kedepannya.

Tahap pelaksanaan adalah suatu langkah yang dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat untuk mendapatkan hasil yang telah disepakati secara para pengambil keputusan serta keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama kedepannya. Hal yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan adalah menilai sejauhmana tingkat keberhasilan dari program yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Kota Batam pada saat ini.

Tahap menikmati hasil adalah bagaimana pemerintah bisa mencapai hasil yang sudah dilaksanakan demi kepentingan bersama-sama dengan masyarakat. keikutsertaan masyarakat dalam menikmati hasil program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam. Pada tahap

menikmati hasil dinilai dari manfaat pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya program kebijakan dari pemerintah daerah Kota Batam untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di wilayah Kota Batam.

Tahap evaluasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengevaluasi program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Batam untuk mengatasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga ini dibahas metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan pilihan metoda penelitian yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang meliputi meliputi tata-cara cara pengumpulan data, tata-cara cara menganalisis data serta tata-cara melakukan interpretasi atas hasil pengumpulan data penelitian, sebagaimana digariskan oleh Creswell (2010:354). Pada dasarnya pendekatan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan deskriptif analitis.

A. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivisme dengan metode kualitatif. Munculnya gugatan terhadap positivisme di mulai tahun 1970-1980an. Pemikirannya dinamai "post-positivisme". Tokohnya; Karl R. Popper, Thomas Kuhn, para filsuf mazhab Frankfurt (Feyerabend, Richard Rotry). Paham ini menentang positivisme, alasannya tidak mungkin menyamaratakan ilmu-ilmu tentang manusia dengan ilmu alam, karena tindakan manusia tidak bisa di prediksi dengan satu penjelasan yang mutlak pasti, sebab manusia selalu berubah. Post-positivisme merupakan perbaikan positivisme yang dianggap memiliki kelemahan-kelemahan, dan dianggap hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Secara ontologis aliran post-positivisme bersifat *critical realism* (realisme Kritis) dan menganggap bahwa realitas memang ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam tapi mustahil realitas tersebut dapat dilihat secara benar oleh peneliti. Secara epistemologis: *Modified dualist/objectivist*, hubungan peneliti dengan realitas yang diteliti tidak bisa dipisahkan tapi harus interaktif

dengan subjektivitas seminimal mungkin. Secara metodologis adalah *modified experimental/ manipulative*. Observasi yang didewakan positivisme dipertanyakan netralitasnya, karena observasi dianggap bisa saja dipengaruhi oleh persepsi masing-masing orang. Proses dari positivisme ke post-positivisme melalui kritikan dari tiga hal yaitu :

- a. Observasi sebagai unsur utama metode penelitian.
- b. Hubungan yang kaku antara teori dan bukti. Pengamat memiliki sudut pandang yang berbeda dan teori harus mengalah pada perbedaan waktu.
- c. Tradisi keilmuan yang terus berkembang dan dinamis (Salim, 2001).

Post positivisme merupakan sebuah aliran yang datang setelah positivisme dan memang amat dekat dengan paradigma positivisme. Salah satu indikator yang membedakan antara keduanya bahwa post positivisme lebih mempercayai proses verifikasi terhadap suatu temuan hasil observasi melalui berbagai macam metode. Dengan demikian suatu ilmu memang betul mencapai objektivitas apabila telah diverifikasi oleh berbagai kalangan dengan berbagai cara.

Asumsi dasar Post Positivisme meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Fakta tidak bebas nilai, melainkan bermuatan teori.
- b. Falibilitas Teori, tidak satupun teori yang dapat sepenuhnya dijelaskan dengan bukti-bukti empiris, bukti empiris memiliki kemungkinan untuk menunjukkan fakta anomali.
- c. Fakta tidak bebas melainkan penuh dengan nilai.
- d. Interaksi antara subjek dan objek penelitian. Hasil penelitian bukanlah reportase objektif melainkan hasil interaksi manusia dan semesta yang penuh dengan persoalan dan senantiasa berubah.

- e. Asumsi dasar post-positivisme tentang realitas adalah jamak individual.
- f. Hal itu berarti bahwa realitas (perilaku manusia) tidak tunggal melainkan hanya bisa menjelaskan dirinya sendiri menurut unit tindakan yang bersangkutan.
- g. Fokus kajian post-positivis adalah tindakan-tindakan (actions) manusia sebagai ekspresi dari sebuah keputusan.

Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada Positivisme. Satu sisi post positivisme sependapat dengan Positivisme bahwa realitas itu memang nyata ada sesuai hukum alam. Tetapi pada sisi lain post positivisme berpendapat manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas. Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan *prinsip triangulasi* yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain.

Sebagai penelitian dengan metode kualitatif, peneliti menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan bertolak pada teori-teori implementasi kebijakan publik. Studi implementasi pengelolaan sampah masih langka dalam bidang ilmu administrasi publik di Indonesia. Penelitian-penelitian mengenai pengelolaan sampah pada umumnya dilakukan dalam bidang ilmu lingkungan, teknologi lingkungan maupun ilmu kesehatan masyarakat.

Sebagai penelitian dengan pendekatan deskriptis analisis, tujuan analisis adalah untuk memperoleh pemahaman atas perilaku individu maupun kelompok, serta organisasi-organisasi. Adapun asas-asas yang digunakan dalam penelitian ini sejalan dengan pemikiran Creswell (2010:352) yang mengatakan bahwa

penelitian kualitatif merupakan sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu.

Untuk mendalami aspek-aspek spesifik dari pengelolaan sampah maka peneliti memosisikan penelitian ini sebagai penelitian studi kasus. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para informan, menganalisis data bertolak dari pemahaman peneliti atas konsep-konsep organisasi, partisipasi, pemahaman atas pengelolaan sampah sebagai bidang pelayanan publik, serta berbagai pemahaman atas obyek yang diteliti. Dengan demikian, di dalam menganalisis data, peneliti mengandalkan berbagai hasil penelitian sebelumnya untuk mengenali secara mendalam atas proses-proses pengelolaan sampah serta seluk-beluk partisipasi masyarakat.

Pilihan peneliti untuk menggunakan metode kualitatif dimaksudkan agar peneliti dapat menelusuri secara fleksibel atas implementasi kebijakan di dalam pengelolaan sampah sebagai salah satu bidang pelayanan publik. Pada hakikatnya studi-studi atas implementasi kebijakan publik mudah dipisahkan dari lokus implementasi kebijakan-kebijakan publik, sebagaimana digambarkan oleh Thomas R Dye (2011) mengenai sifat studi kebijakan publik. Oleh sebab itu Thomas R Dye mengingatkan bahwa penelitian-penelitian kebijakan publik hendaknya bertolak dari adanya pilihan pendekatan tertentu dan bertolak dari kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam ilmu administrasi publik.

Agar proses penelitian dapat memberikan hasil yang optimal, maka penelitian ini dilakukan sebagai studi kasus. Sebagai studi kasus, penelitian ini

yang dilakukan dengan serangkaian wawancara mendalam di satu Kecamatan Bengkong Kota Batam.

B. Jenis Penelitian.

Dalam pelaksanaan suatu penelitian, harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang akan diambil bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dan relevan. serta memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan tujuan dari penelitian. Maka, dari itu peneliti harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar yang menjadi pandangan berfikir dalam menggunakan metode penelitian. Jenis penelitian yang peneliti rasa tepat untuk melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Dalam melakukan penelitian ilmiah perlu diketahui dan dipelajari metode penelitian. Metode penelitian dapat juga dikatakan sebagai strategi dalam pemecahan masalah, karena pada tahap ini dapat memberikan gambaran bagaimana suatu masalah dalam penelitian dapat dipecahkan dan ditemukan jawabannya. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tahap-tahap dari penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang mencoba menggambarkan secara mendalam suatu obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Sugiyono (2008:7) menyatakan bahwa metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya yang belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode kualitatif mampu mengungkap realitas ganda, lebih bisa mengungkapkan hubungan yang wajar antara peneliti dengan responde. Metode kualitatif lebih sensitive dan adaftif peran berbagai pengaruh timbale balik dari sebuah penelitian.

Penggunaan pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2008: 8), sering disebut juga dengan penelitian naturalistic, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian dengan paradigma kualitatif berupaya mengembangkan ranah penelitian terus menerus memperluas pertanyaan dari penelitian, dan bahkan mampu memunculkan pemikiran dan hipotesis baru dan isi baru lagi bagi penelitian kedepannya.

C. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti, guna memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran. Disini peneliti memilih dan menetapkan tempat penelitian pada Kantor Kecamatan Bengkong Kota Batam. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan dan alasan bahwa penulis ingin mengetahui secara rinci dan jelas untuk menganalisis kebijakan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kantor Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Adapun alasan pemilihan lokasi adalah:

- a. Kecamatan merupakan unit pengolahan persampahan di Kota Batam yang di tugaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mengurus pengelolaan sampah pada setiap kecamatan yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan kebijakan pengelolaan sampah.
- b. Kecamatan Bengkong merupakan satu dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, dengan jumlah penduduk sebanyak 104.398 jiwa. Kecamatan Bengkong memiliki luas 13,160 Hektar yang terdiri dari empat Kelurahan.
- c. Sedangkan tipologi fungsi lahan adalah perumahan atau pemukiman padat penduduk, sentra industri dan perkantoran.

D. Metode Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian, penulis harus tahu apa yang harus diteliti dan data-data apa saja yang harus diambil dan dikumpulkan untuk melengkapi laporan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dan Kecamatan Bengkong Kota Batam dan untuk kelancaran pengambilan /pengumpulan data-data dari kantor tersebut, penulis meminta surat pengantar atau surat ijin penelitian dari Universitas untuk ditujukan kepada Kecamatan Kota Batam. Dalam pengumpulan data tersebut penulis melakukan teknik-teknik pengumpulan data agar data lebih valid dan lengkap dalam menyusun laporan penelitian.

Menurut Bungin (2001 : 129), teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data jika tidak digunakan semestinya, akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber dan jenis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut

a. Observasi (Pengamatan)

Yaitu sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka memperkuat dan meyakini hasil wawancara dan studi dokumenter, dengan mencatat segala kejadian dan fenomena yang terjadi selama mengadakan penelitian. Data yang diperoleh dari pengamatan ini adalah tentang keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responseiveness*), kepastian (*assurance*), empati (*emphaty*) dan

Wujud fisik (*tangibility*) dalam memberikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Interview (Wawancara)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (responden) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pada teknik ini, peneliti mengadakan tatap muka dan berinteraksi tanya jawab langsung dengan pihak informan atau subyek untuk memperoleh data.

c. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara ataupun observasi, maka perlu juga digunakan data tertulis yang telah ada dan mampu digunakan sebagai pendukung pencapaian tujuan penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah peraturan- peraturan, struktur organisasi, tupoksi dan data-data lain yang menunjang.

E. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat penulis dapat menemukan data dan informasi yang diperlukan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka data-data yang diperoleh melalui :

1. Informan, untuk key informan dipilih secara self report, yaitu didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi yang langsung didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan dan kompeten dengan permasalahan yang diteliti, yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kabid Bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota

Batam, Anggota DPRD yang membawahi kebijakan pengelolaan sampah, Camat Bengkong, Petugas /pegawai Kantor Camat Bengkong, informasi dari tokoh masyarakat di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkong serta masyarakat yang merasakan langsung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Bengkong Kota Batam

2. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung dari dekat terhadap objek penelitian. Dalam hal ini keadaan di Kantor Kecamatan Bengkong Kota Batam, lokasi tempat pemungutan sampah yang dilakukan oleh setiap petugas yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam agar setiap kecamatan mengelola sampah secara mandiri dan dilakukan pengumpulan sampah di tempat penampungan sementara setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkong Kota Batam tentang Analisis kebijakan pengelolaan sampah.
3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data secara langsung dari dokumen-dokumen arsip dan catatan lain yang dianggap perlu dalam penelitian ini serta foto keadaan yang sebenarnya.

F. Informan Penelitian

Informan sebagai sumber data primer akan dipilih dengan cara menetapkan *key person* untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian ini. Informasi dihimpun dengan wawancara. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan sumber data primer dari narasumber atau informan. Penentuan informan penelitian dilakukan dengan terlebih dahulu menelusuri kalangan stakeholder yang terlibat dalam proses penanganan sampah. Mata rantai pengelolaan sampah dibatasi dari pada tingkat aparaturnya pemerintah

terdepan yakni, Kabid pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan pejabat yang membawahi pengawasan atau mitra kerja dari Dinas terkait seperti pejabat Anggota DPRD Kota Batam Komisi III, Sekeretaris Camat Bengkong, Pegawai pengawasan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong. Sedangkan dari pihak masyarakat, Tokoh Masyarakat, LSM dan masyarakat itu sendiri yang berada di wilayah Kecamatan Bengkong yang akan di wawancara untuk mendapatkan informasi. Adapun narsumber atau informan di dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebut pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Posisi	Alasan
1.	Pak. F	Kabid Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Untuk menggali informasi mengenai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam dalam penanganan sampah di wilayah setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam serta implementasi kebijakan yang diterapkan.
2.	Pak MYM	Anggota DPRD Kota Batam Komisi III mitra kerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Sebagai pejabat yang mengawasi dan mengontrol jalannya kebijakan teknis kegiatan yang melaksanakan kegiatan penanganan kebersihan di wilayah Kota Batam dan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan kebersihan masyarakat.
3.	Pak DM	Anggota DPRD Kota Batam	Memberikan informasi terkait pelaksanaan Perda No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Batam dalam fungsi Budgeting dan Pengawasan.

4.	Pak MM	Kepala Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong	Sebagai pelaksana kegiatan pelayanan pengangkutan dan pembuangan sampah di tempat yang sudah ditentukan, kegiatan pemantauan kondisi sampah pada tempat penampungan sampah sementara (TPS), serta memfasilitasi dan membantu kebersihan wilayah Kecamatan Bengkong
5.	Pak AS	Petugas Pengawasan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong	Untuk menggali informasi mengenai Pengelolaan persampahan dan peran serta warga masyarakat dalam pengelolaan sampah yang ada di kawasan Kecamatan Bengkong
6.	Pak AI	Ketua RW 02 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong	Untuk menggali informasi mengenai pelayanan persampahan dan peran serta warga dalam pengelolaan sampah yang ada di kawasan pemukiman padat penduduk tidak tertata
7.	Pak HM	Tokoh Masyarakat Kecamatan Bengkong	Untuk menggali informasi mengenai pelayanan persampahan dan peran serta warga dalam pengelolaan sampah yang ada di kawasan pemukiman tertata (Komplek Perumahan)
8.	Pak Am	Ketua RT 015 RW 03 Kelurahan Bengkong Indah Kecamatan Bengkong	Untuk mengetahui manajemen pelayanan persampahan dan peran serta warga dalam pengelolaan sampah yang ada di kawasan pemukiman tidak tertata
9.	Ibu RBB	Warga Kecamatan	Untuk mengetahui manajemen

		Bengkong	elayanan persampahan dan peran serta warga dalam pengelolaan sampah yang ada di kawasan pemukiman tertata
10.	Ibu TW	Warga Kecamatan Bengkong	Untuk mengetahui pendapat masyarakat tentang pelayanan persampahan di Kelurahan Papanggo dan peran serta warga yang ada di kawasan pemukiman tertata

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992 : 20), analisa data kualitatif terdiri dari :

1. Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dari aneka macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi, pita rekaman dan lain-lain) dikumpulkan kemudian direduksi atau dipilah-pilah.

2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, perumusan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara terpadu dan sudah dipahami yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Menarik kesimpulan

Verifikasi dari berbagai temuan data yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung.

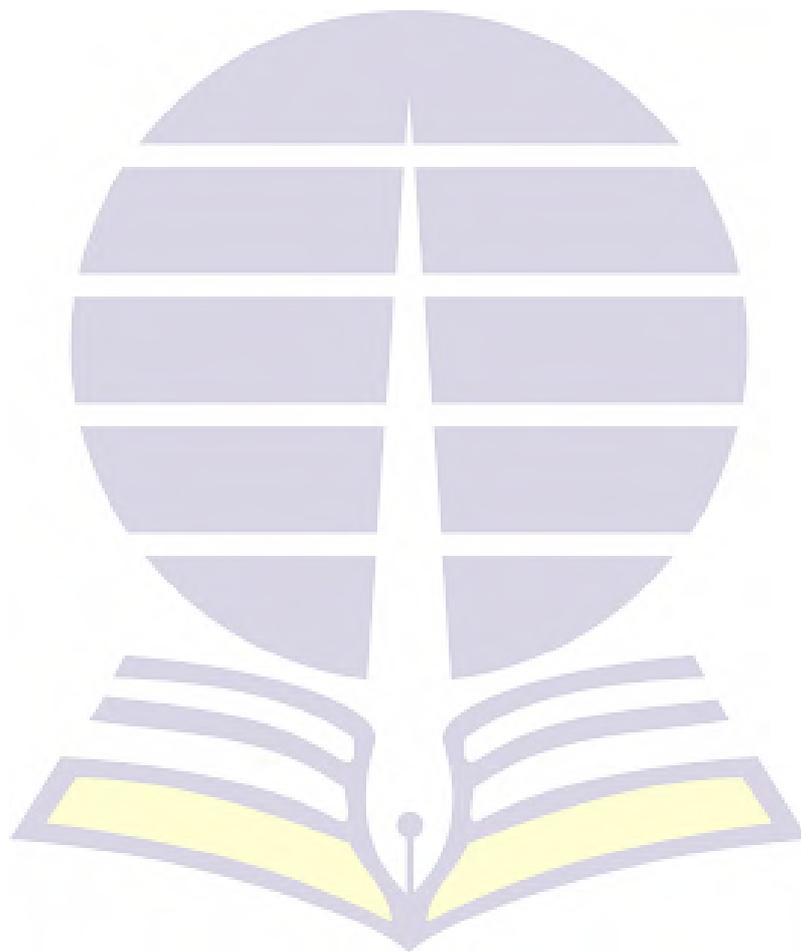
H. Kendala Dalam Penelitian

Memasuki awal tahun 2020 seluruh dunia mengalami situasi pandemi Virus Covid-19 atau yang disebut dengan Virus Corona yang di mulai oleh Negara China. Dimana virus ini dengan cepat meluas penyebarannya hingga ke Indonesia yang terkena dampak pertama kali pada bulan Februari 2020 yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi indonesia menurun dengan diberlakukannya pembatasan sosial bersekala besar.

Sehingga untuk mendapatkan informasi dan data wawancara dengan para nara sumber terhambat dalam pengumpulan data dan informasi mengalami keterhambatan proses kegiatan. Namun dibalik dari wabah pandemi Covid-19 ini penulis bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya kebersihan merupakan hal yang utama dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari segala macam penyakit.

Pelaksanaan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan pengambilan gambar menjadi fokus utama dalam penyelesaian pembahasan analisis pengelolaan sampah di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang menyerang seluruh negara di dunia

yang menyebabkan kelumpuhan pertumbuhan ekonomi secara masal di setiap negara yang ada.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang semakin memperoleh perhatian dalam studi administrasi publik. Pengelolaan sampah yang sudah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, mengatur juga penyelenggaraan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah. Studi ini menelusuri bagaimana praktik pelaksanaan pengelolaan sampah oleh lembaga terkait peran serta atau partisipasi warga dalam mewujudkan tujuan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Gambaran umum ini merupakan liputan data sekunder yang terdiri dari gambaran umum BP Kawasan, gambaran Pemerintahan Kota Batam, gambaran lokasi penelitian, fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan, tinjauan deskriptif atas dokumen-dokumen kebijakan pengelolaan sampah sebagai kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta kebijakan peningkatan peran serta masyarakat di dalam rangka pengelolaan sampah sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan terkait.

Paparan pada bab ini diawali dengan penjelasan sekilas mengenai sejarah asal usul Kota Batam dan nama Kecamatan Bengkong, luas wilayah, demografi, organisasi tata kerja Kecamatan Bengkong, tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong serta penjelasan mengenai pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong. Pada bagian kedua merupakan tinjauan atas kebijakan pengelolaan sampah, yang kemudian disusul dengan pembahasan atas analisis

pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh lembaga terkait begitu pula peran serta warga dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong.

A. Sejarah Umum Kota Batam.

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Bareleng. Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2019, jumlah penduduk Batam mencapai 1.337.187 jiwa. Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK).

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini bernama *BP Batam*), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kali lipat.

Pada tahun 1970-an, dengan tujuan awal pemerintah pusat menjadikan Batam sebagai Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak pembangunan Batam. Kini setelah lebih dari 40 tahun Otorita Batam terbentuk

sekarang berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan Otorita Batam atau pada saat ini bernama (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan Badan Otorita Batam (BP Batam). Pada saat transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan era Otonomi Daerah. Status Kotamadya Batam pun berubah menjadi menjadi Kota Batam berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Namun keberadaan Otorita Batam tetap diatur dalam Pasal 21 dari Undang-Undang tersebut. Dalam pasal dijelaskan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Persetujuan antara BP Batam dan Pemko Batam setelah berubahnya status Kotamadya Batam menjadi terbentuknya Pemerintahan Kota Batam terus terjadi hingga pada bulan September tahun 2019 mengalami masa transisi penyatuan antara BP Batam dan Pemko Batam. Dimana pemerintah membuat kebijakan BP Batam menjadi ex-Officio Kepala BP Batam, yaitu Walikota Batam rangkap jabatan menjadi Kepala BP Batam. Hal ini lah yang membuat suatu keunikan

yang terjadi didalam kepemimpinan daerah di Kota Batam. Dimana walikota Batam menjabat dua kekuasaan tertinggi yang ada di Kota Batam untuk menjalankan roda pemerintahan.

B. Sejarah Umum Kecamatan Bengkong

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam bahwa tujuan dilakukannya pemekaran adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. Peningkatan efektifitas tersebut dilakukan mengingat jarak antara pusat kecamatan dan kelurahan yang cukup variatif serta semakin meningkatnya kepadatan penduduk pada beberapa kecamatan akibat tingginya minat pendatang untuk mencari kerja di Pulau Batam.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Bengkong yang merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran dari wilayah induk Kecamatan Batu Ampar yang memiliki luas wilayah $\pm 9,8$ Km². Kecamatan Bengkong terbentuk sesuai dengan peraturan daerah Kota Batam tentang pemekaran yang disahkan oleh walikota Batam pada tahun 2006.

Kecamatan Bengkong merupakan salah satu dari dua belas kecamatan yang ada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 92.033 jiwa. Dimana lokasi kondisi geografis Kecamatan Bengkong merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah

terbesar dari kecamatan lain serta memiliki geogarfis yang berdekatan langsung dengan laut sebagai batasan akhir dari Kecamatan Bengkong Kota Batam.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Bengkong mempunyai letak geografis yang berbatasan langsung dengan laut. Dimana Kecamatan Bengkong memiliki wilayah laut yang merupakan salahsatu penopang perekonomian masyarakat sebagai nelayan tradisonal. Secara Administrasi Kecamatan Bengkong memiliki 4 (empat) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bengkong Laut (0001)
2. Kelurahan Bengkong Indah (0002)
3. Kelurahan Sadai (0003)
4. Kelurahan Tanjung Buntung (0004)

Dengan dilakukannya pemekaran ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah, terutama menyangkut dengan kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan serta menciptakan suasana tentram dan aman bagi masyarakat.

Batas-batas wilayah Kecamatan Bengkong adalah :

- Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar.
- Sebelah Selatan : Kelurahan Sei. Panas Kec. Batam Kota.
- Sebelah Barat : Kelurahan Pelita Kec. Lubuk Baja, Kelurahan Seraya, Kec. Batu Ampar.
- Sebelah Timu : Laut Nongsa.

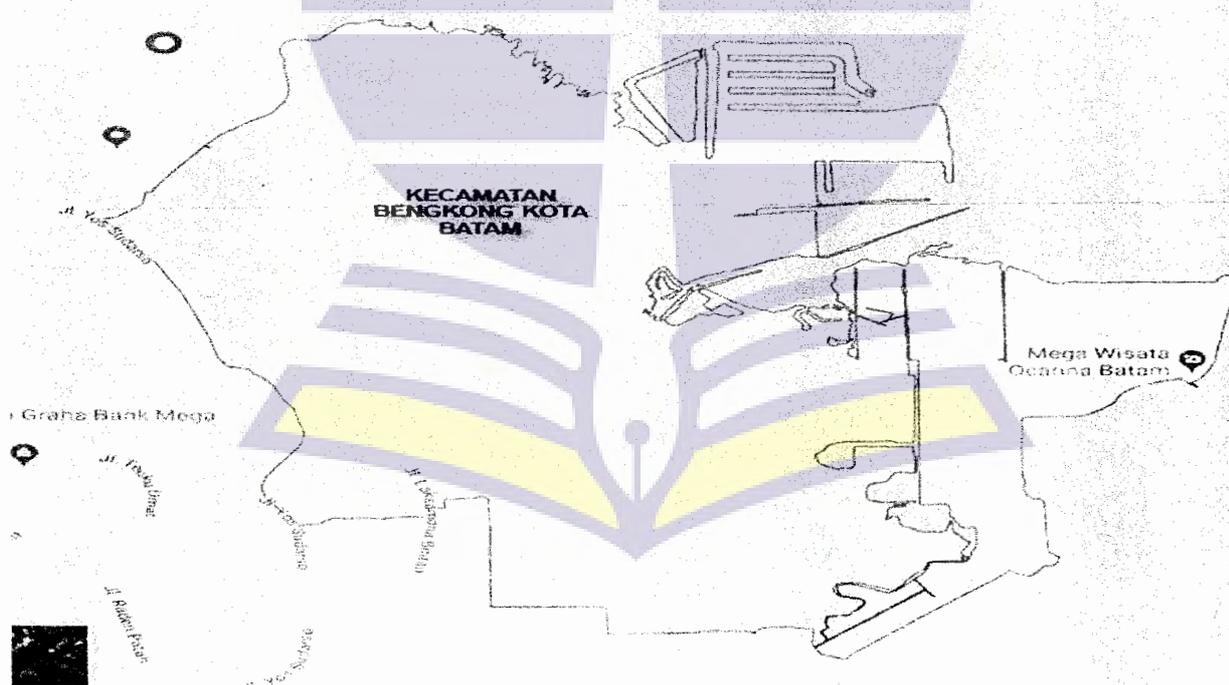
Berikut ini luas wilayah Kecamatan Bengkong sesuai dengan Kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Bengkong Kota Batam, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan

KECAMATAN	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km ²)
Bengkong	1. Kelurahan Bengkong Laut	1,829
	2. Kelurahan Bengkong Indah	999
	3. Kelurahan Bengkong Sadai	6,326
	4. Kelurahan Tanjung Buntung	4,006
Total Luas Wilayah Kecamatan Bengkong		13,160

Sumber: Data Kantor Camat Bengkong

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Bengkong

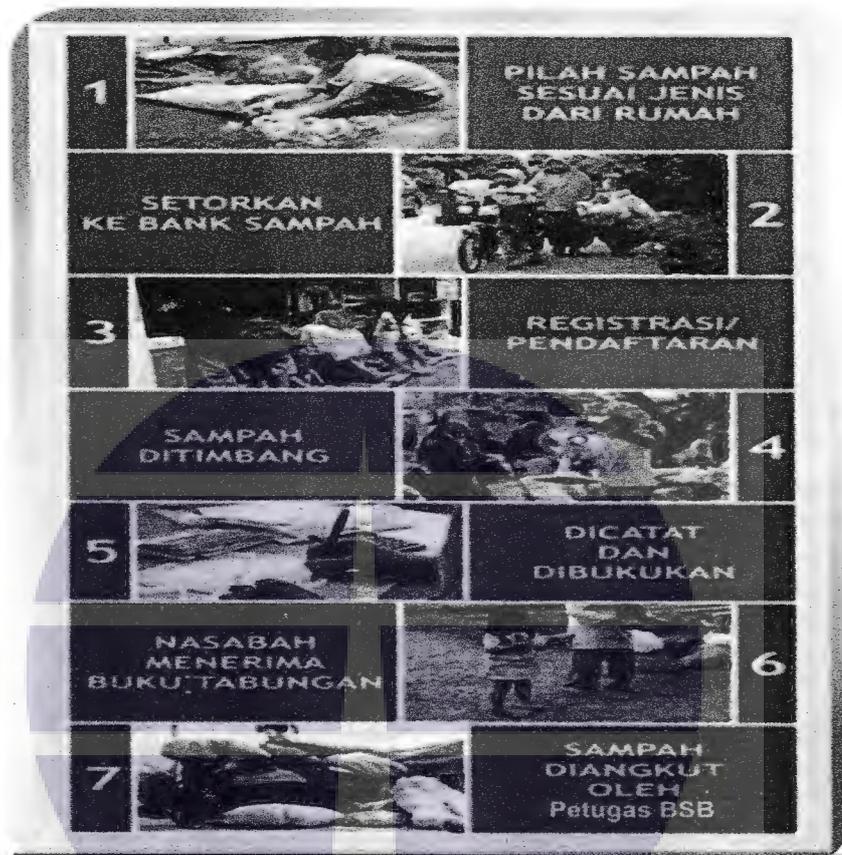


Sumber : Peta Kecamatan Bengkong Kota Batam

Gambar 4.2 Lokasi TPS Kecamatan Bengkung



Gambar 4.3 Proses Kegiatan Bank Sampah Kecamatan Bengkong



Gambar 4.4 Kegiatan Bank Sampah Kota Batam



Sumber Foto kegiatan Bank Sampah Kota Batam.

Gambar 4.5 Lokasi Bank Sampah Kecamatan Bengkong



Sumber : Foto Peneliti Tahun 2020

2. Struktur Organisasi Kecamatan Bengkong

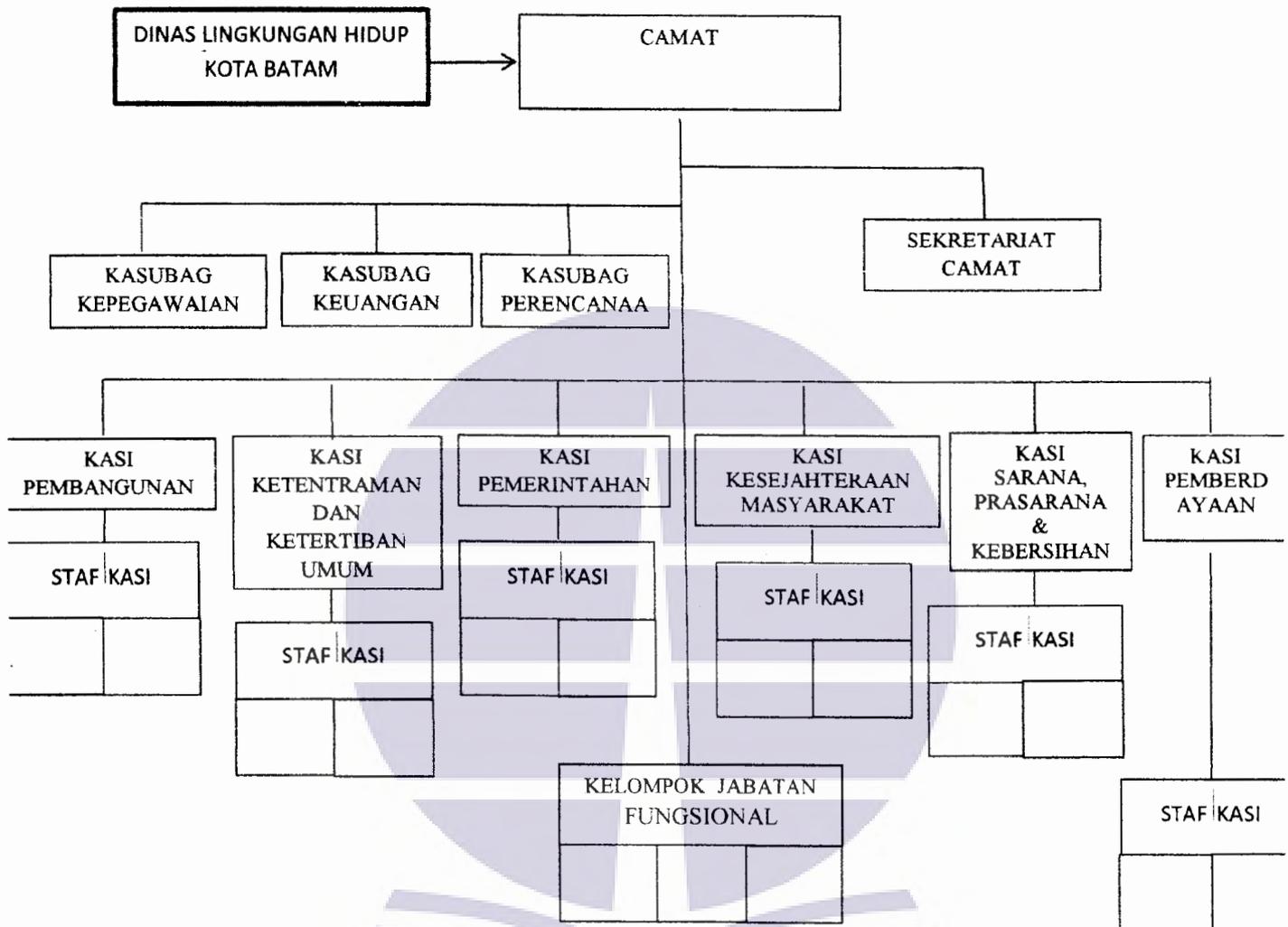
Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, Kecamatan merupakan perangkat daerah dibawah langsung oleh Walikota yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pertanggungjawaban Camat kepada Walikota sebagaimana dimaksud merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kecamatan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota.

Susunan organisasi Kecamatan Bengkong terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretariat Camat
- c. Kasubag Kepegawaian
- d. Kasubag Keuangan
- e. Kasubag Perencanaan
- f. Kasi Pemerintahan,
- g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- h. Kasi Pelayanan Umum
- i. Kasi Kesejahteraan Masyarakat
- j. Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
- k. Kasi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan.
- l. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi.
- m. Kasubag Keuangan
- n. Kasubag Kepegawaian
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.





Bagan 4.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Bagan 4.1 di atas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Bengkong di pimpin oleh seorang camat serta dibantu oleh sekeretaris camat yang dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kepala sub bagian dan 6 (enam) kepala seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepulauan Riau.

3. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bengkong.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Batam, pasal 2 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- c. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.
- d. Pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan.
- e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan;
- f. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
- g. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

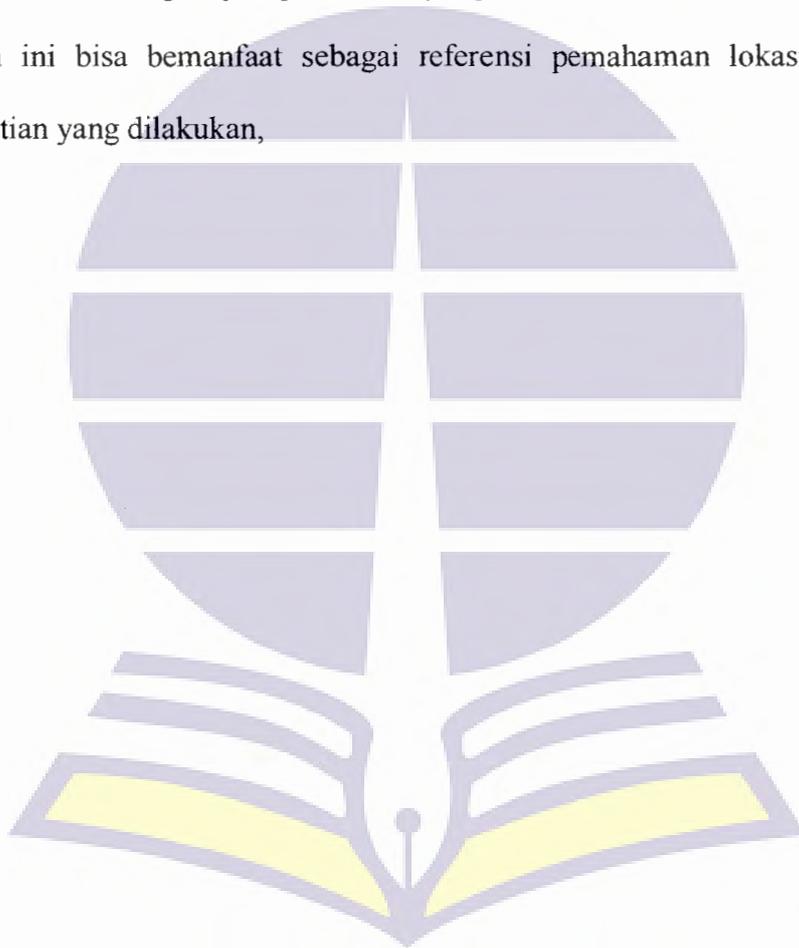
- h. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan.
- j. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup tugasnya.
- k. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam lingkup tugasnya.
- l. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugasnya.
- m. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dalam lingkup tugasnya.
- n. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan dalam lingkup tugasnya.
- o. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan.
- p. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan.
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. Rangkuman Gambaran Umum

Gambaran umum ini perlu penulis masukkan sehubungan dengan karakter spesifik Kota Batam menurut sejarah pembentukannya, sebagai pulau yang dimaksudkan agar menjadi pusat perkembangan industri dan ekonomi. Dalam perjalanannya mengalami berbagai permasalahan, adapun status lokasi penelitian

yakni Kecamatan yang merupakan bagian dari fungsi Kota Batam pada awalnya, pada hakekatnya secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan Kota Batam hari ini.

Gambaran umum lokasi penelitian ini merupakan uraian singkat atas lokasi penelitian dan perkembangan kata secara umum untuk mengetahui secara garis besar tentang objek penelitian yang dilakukan. Secara singkat gambaran umum ini bisa bermanfaat sebagai referensi pemahaman lokasi dalam objek penelitian yang dilakukan,





BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini data yang dihimpun dari lapangan dianalisis oleh penulis. Data berupa hasil wawancara yang keseluruhan direkam oleh peneliti serta kemudian peneliti gunakan untuk membahas pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, khususnya di Kecamatan Bengkong?
2. Bagaimana partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong?

Adapun pokok-pokok yang dianalisis ialah eksplorasi peneliti atas data berupa hasil wawancara yang meliputi (i). kapasitas saat ini dari armada pengelolaan sampah; (ii) potensi pengelolaan sampah untuk dikelola pihak ketiga; (iii) keterbatasan armada untuk mengelola sekitar 800 ton s/d 1.000 ton sampah di kota Batam; (iv) kebijakan pengelolaan sampah yang sudah menyebutkan bahwa perlu ada proses reuse dan recycle, (v) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah namun dalam kenyataan masih belum dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Batam khususnya Kecamatan Bengkong yang sebagai objek dalam penelitian ini.

Model kebijakan publik pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal dengan *implementation as a political and administrative process*. Dimana menurut Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu:

a. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcome), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin didapatkan. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada kasi kebijakan itu sendiri.
- Apakah tujuan itu bisa tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor yaitu, dampak dan efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

b. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri yang terdiri dari, isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

1. Implementasi Pengelolaan Sampah DI Kecamatan Bengkong.

Pengelolaan sampah di Kota Batam menghadapi dualisme manajemen dalam pengelolaannya. Pertama sejak tahun 2000 dimana awal pembentukan Kota Batam yang sebelumnya berstatus Kotamadya Batam dan belum terbentuk DPRD Kota Batam yang masih berstatus dibawah pengelolaan oleh Otorita Batam. Dengan berjalannya waktu Kota Batam terbentuk dan Otorita Batam masih

mempunyai peranan yang sangat penting dalam tata kelola kawasan perdagangan bebas Batam mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya Kota Batam merupakan bagian dari rancangan untuk mewujudkan sebuah kota alternatif atas Singapura. Namun seiring berjalannya waktu terjadi permasalahan perebutan kekuasaan atas apa yang harus dilakukan antar dua pemerintahan di Kota Batam. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya dua badan pemerintahan yang mengurus Batam, yaitu Badan Otorita Batam sekarang merubah nama menjadi Badan Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Pada akhirnya untuk mengatasi permasalahan dualisme kepemimpinan di Kota Batam pemerintah pusat membuat suatu kebijakan pada bulan September 2019, Badan Pengusaha Kawasan Batam (BP Batam), disatukan dengan pemerintah Kota Batam yang di pimpin oleh ex-Officio BP Batam yang dijabat oleh Walikota Batam, sekaligus memimpin BP Batam agar terjadi sinkronisasi setiap kebijakan yang ditetapkan.

Narasumber (YM) yang merupakan salaku anggota Komisi III DPRD Kota Batam melihat permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Batam dari dampak dualisme manajemen publik yang terjadi sampai saat ini. Dimana Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam masih melakukan pembagian tugas dan fungsinya secara masing-masing agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian manajemen publik.

Narasumber YM mengatakan: ‘ Betul, Komisi III merupakan mitra eksekutif, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , yang dulunya bernama

DKP atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan berubahnya Perda (perturan daerah) ini hingga DKP itu bergabung ke Lingkungan. Dinas Lingkungan ini sudah berjalan sejak tahun 2017.

Dimana dalam pembagian tugas atau pekerjaan-pekerjaan tertentu, sebagaimana digariskan dalam kebijakan tentang pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga, maka Pemerintah Kota Batam juga menerapkan hal itu. Narasumber YM mengatakan: ‘ Jadi, Pemerintah Kota Batam mengenai masalah sampah dulunya juga itu sistem pihak ketiga. Jadi, Kota Batam, dari dua belas kecamatan hanya ada sembilan kecamatan yang pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak ketiga, dan tiga kecamatan yang ada di Batam berada di luar Pulau Batam. Jadi itu kemarin hanya dibagi menjadi tiga zona.’

Pengelolaan sampah kemudian dipilah menjadi 3 zona, di mana pada tahun 2016-2017 sebanyak 2 zona diambil oleh pemerintah, sehingga tinggal 1 zona diolah oleh pihak ketiga (swasta). Satu zona Kecamatan Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja itu masih di pihak ketiga. Pada tahun 2017 terjadi perubahan Peraturan daerah di mana Kebersihan itu berada di Kecamatan.’

Dengan perubahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan wewenang tugas kepada setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dibawah pengawasan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Namun hal ini tidak berarti bahwa seluruh kegiatan fisik sepenuhnya dikelola oleh pihak Kecamatan. Lebih jelasnya narasumber mengatakan: ‘Istilahnya, sistem pengelolaannya, pengangkutannya itu berada di kecamatan. Namun secara pertanggung jawabannya masih ada di

bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, informasi dari salah satu Kabag Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup narasumber FZ, itu dia istilahnya secara pertanggung jawabannya masih (tetap oleh Dinas). Tapi secara pengelolaan, per kecamatan”.

Dalam pelaksanaan setiap kebijakan terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepentingan yang mempengaruhi setiap kebijakan yang ditetapkan terkait dengan bagaimana proses pengelolaan sampah itu berdampak kepada kepentingan yang mempengaruhi masyarakat dalam berperan serta dengan pemerintah untuk melakukan pemanfaatan pengelolaan sampah menjadi keuntungan ekonomis bagi masyarakat.

Pengalihan aktifitas ke level Kecamatan ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih dekat dengan lokasi. Artinya, dengan adanya pembagian wilayah pengelolaan menurut kecamatan, maka Camat dapat terlibat langsung di dalam mengawasi pelayanan publik di lokasi yang ditentukan. Namun setiap kebijakan yang dikeluarkan terdapat kepentingan yang menjadi acuan dalam setiap pengambilan keputusan, seberapa kepentingan tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat itu sendiri. Mengenai penilaian atas pengalihan, narasumber menyatakan: AI Ketua RW02 Bengkong Permai Kecamatan Bengkong ‘

“Ya. Alhamdulillah, saya lihat sistem pelaksanaannya dibanding tahun yang lalu lebih bagus di kecamatan. Karenanya kenapa? Ya antara masyarakat dengan kecamatan kan cukup dekat istilahnya. Jadi, kalau terjadi penumpukan sampah ya itu lebih cepat masyarakat komunikasi dengan kecamatan. Kalau dulu di DKP, susah, jauh. Nah sekarang lebih cepat. Namun masih ada kendala juga masih kurangnya armada untuk

pengangkutan sampah menjadi pokok permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan pemerintah untuk mengatasi penumpukan sampah di wilayah Kecamatan Bengkong.

Sementara itu, terkait dengan tipe manfaat dari setiap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah mempunyai dampak untuk melihat bagaimana kualitas layanan, khususnya dalam hal bagaimana sampah itu tidak dibiarkan lama menumpuk di tempat pembuangan sampah sementara, atau agar selalu segera dipindahkan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah untuk mengatasi permasalahan tertumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara, maka seorang warga, narasumber RBB (warga) mengatakan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi adalah lambannya pemindahan sampah dari lokasi penampungan yang masih berada di kecamatan TPS ke TPA. narasumber RBB (warga) mengatakan: ‘

“Dengan adanya perubahan pengelolaan sampah yang dilakukan secara langsung oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Batam tidak serta merta membuat pengelolaan sampah langsung menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di Kecamatan Bengkong masalah yang paling mendasar adalah ketersediaannya alat angkut sampah yang dikumpulkan dari hasil sampah rumah tangga masih mengalami kekurangan armada. Sehingga pada saat pengumpulan sampah ke tempat penampungan sampah sementara TPS terjadi penumpukan sampah yang masih lambat ditangani untuk di lakukan pengangkutan ke tempat pembuangan akhir sampah TPA. Ibu RBB juga memberitahukan bahwa pola lama ditandai seringkali dengan masih bertumpuk-tumpuknya sampah di lokasi dekat hunian mereka. Tumpukan sampah di ruang yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka dapat menimbulkan timbulnya penyebaran virus penyebab melimpahnya sampah di lingkungan tempat tinggal.”

Dengan hasil wawancara yang diterima, pemerintah seharusnya melakukan pengkajian ulang tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di setiap Kecamatan, seperti memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah hasil rumah tangga yang mempunyai nilai jual yang berguna untuk mengurangi sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan sampah rumah tangga.

Narasumber anggota DPRD membenarkan seringnya terjadi penundaan bilamana sampah diurus oleh unit kerja di tingkat kota, dan bukan di lakukan tingkat kecamatan yang terjadi selama ini sebelum dialihkan untuk fokus pengelolaan sampah dilakukan oleh setiap kecamatan secara langsung yang memberikan efek yang nyata dari pada dikelola oleh dinas terkait secara langsung. Narasumber YM mengatakan:

“Batam ini armadanya (truk pengangkut sampah) masih kurang sehingga masih banyak penumpukan-penumpukan sampah di masyarakat. Kemudian, daya angkatnya itu seharusnya setiap hari ya sekarang masih ya mungkin satu minggu itu kalau nggak salah enam kali seminggu. Eh, maaf 4 kali ya? Ya, seminggu 4 kali. Harusnya setiap hari ada pengangkutan sampah. Ya, seharusnya. Itu yang idealnya. Tapi karena kondisi pengadaan armada masih kurang, sehingga belum maksimal. Tapi istilahnya, dengan beradanya di kecamatan kapan saja masyarakat bisa menelepon, untuk memberikan informasi bahwa sampah masih belum dilakukan pengangkutan di wilayah kerjanya setiap kecamatan”

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Batam ialah problematika fasilitas pendukung, yang justru sangat menentukan, yakni TPA sementara. Narasumber FZ Kabid Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengatakan:

“Kami selaku pejabat pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Batam masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Namun kita sudah memberikan perubahan-perubahan dalam pelaksanaannya untuk dilakukan di setiap kecamatan untuk melakukan efisiensi waktu dan pengelolaannya lebih cepat. Memang kondisi istilahnya sampah masih bertumpuk di lapangan di tempat pembuangan sementara, itu jadi kendala juga karena Batam ini tidak disiapkan tempat TPS sementara.”

Namun demikian, persoalan ini memang tidak mudah ditasi, karena warga juga tidak sepenuhnya bersedia untuk berkorban memberikan tempat penampungan sampah sementara dalam mengatasi persoalan ini, di antara menurut narasumber bahwa warga keberatan jika fasilitas pembuangan sampah

ditaruh di lokasi atau di sekitar hunian mereka, karena dapat menimbulkan bau yang menyengat. Namun apabila pemerintah bisa memberikan komitmen untuk melakukan pengangkutan sampah sementara secara rutin maka masih bisa dipertimbangkan.

Menyikapi keadaan ini narasumber menyadari bahwa proses kebijakan perlu ditegakkan untuk mencapai derajat perubahan yang ingin dicapai, yakni dari sisi siklus kebijakan, suatu kebijakan yang diidentifikasi tidak atau masih kurang 'kena' sebagai solusi, maka perlu diambil langkah lain guna merumuskan kembali kondisi yang kurang kondusif ini pada proses kebijakan berikutnya. Narasumber menekankan pentingnya pengadaan tempat penampungan sementara. Narasumber mengatakan:

“Ya. Karena ya lambatnya tadi diangkat akhirnya ya bau itu.. Tapi ini nanti menjadi masalah kita yang harus kita selesaikan ke depan. Dan ini tidak bisa.. Karena ini, masalah sampah ini kan tanggung jawab pemerintah publik. Dan memang Pemerintah Kota ada wacana juga, bahan, ini nanti akan dipihak-ketigakan sistem pengelolanya. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir. Jadi di TPA lapangan ... itu lagi menunggu. Kita lagi juga bahas Perdana tentang ‘Tifinfi’, tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Dulunya sudah pernah Kota Batam ya tapi pihak ketiga itu gagal. Perusahaan SSET kemarin itu. Nanti juga ada dokumen-dokumennya, bisa kita pelajari. Dan sampai hari ini itu yang pemerintah, kita tunggu-tunggu itu. Karena kalau itu berhasil, berjalan, ya dan ini kan bisa menghasilkan energi listrik. Dan jumlah sampah di Batam sampai hari ini sekitar 800..”

Perhatian terhadap perubahan ke depan dikemukakan oleh narasumber FZ, yakni ‘trend’ dalam hal pengelolaan sampah. Sampah tidak semata-mata merugikan, namun perkembangan terkini dalam pengelolaan sampah ialah menggali manfaat pada sampah. Teknologi baru yang sudah diterapkan di negara maju menemukan bahwa sampah bisa diolah dan dapat bernilai ekonomi. Narasumber mengungkapkan:

“Ya, per hari jika dikalkulasi setiap orang mengumpulkan sampah 0,5kg/hari maka, hasil sampah yang dihasilkan dari 1 juta penduduk Batam saya yakin bisa mencapai 500 ton. Tapi kan tentu dia melihat jumlah penduduk kan. Karena kapasitas penduduk. Dan juga sampah di Batam sebenarnya ada sampah yang ada nilai ekonominya. Karena ada sampah industri. Jadi itu sampah-sampah yang ada di industri.. Tapi industri ini punya sistem tersendiri, kontrak dengan perusahaan-perusahaan pihak ketiga mengangkatnya itu. Tapi secara aturan, dia tetap membayar retribusi ke pemerintah, dengan hitung-hitungan sudah ada itu anu.. Nanti kita coba minta saja nanti Perdanya ini, nanti kita kasih Perdanya.”

Narasumber mengungkapkan bahwa tiga persoalan pelik yang dihadapi oleh pemerintah kota Batam dalam pengelolaan sampah. Permasalahannya pertama ialah menyangkut tempat pembuangan sementara, ketersediaan armada dan pengawasan dari pihak Kecamatan. Guna mewujudkan efektifitas pengelolaan sampah, seharusnya daya angkut armada dapat mengangkat seluruh sampah setiap hari. Peneliti memperkirakan bahwa jika demikian diperlukan kapasitas armada yang dapat mengangkat 6.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah setiap harinya.

Apabila letak pengambilan keputusan kebijakan dalam proses pengelolaan sampah di Kota Batam masih menerapkan pembuangan sampah akhir disana, serta tidak melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi sampah, mungkin nanti kedepannya Kota Batam menjadi kota sampah. Batam ini kan pulau, kalau TPA di Telaga Punggur itu dikelola seperti sampai hari ini, hitungan kita itu sekarang paling umur itu paling 4 tahun. Itu penuh. Jadi sekarang dimana mau cari lokasi lagi, jadi pemerintah harus segera ini, istilahnya melaksanakan pengolahan sampah secara teknologi itu. Kalau enggak, Pemerintah Kota Batam akan kewalahan mencari tempat lagi. Dimana lokasi lagi? Kalau misalnya di

pulau, lebih besar lagi biaya. Harus pakai kapal lagi pula ngangkut kesana dan kemungkinan di laut bisa dibuang lagi oleh oknum.

Dilihat dari fungsi dan peran dari DPRD Kota Batam dalam bentuk penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kota Batam umumnya memberikan beberapa pemahaman tentang tugas dan fungsinya DPRD Kota Batam dalam penanggulangan Sampah di Kota Batam serta pelaksanaan program pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah, menurut narasumber DJ selaku anggota Komisi III DPRD Kota Batam yang mengawasi OPD terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tentunya tugas dan fungsi dari kami anggota DPRD Kota bukan hanya melakukan pengawasan terhadap OPD Dinas Lingkungan Hidup saja, akan tetapi kita juga menganggarkan biaya operasional selama satu tahun yang diperlukan oleh OPD terkait untuk menjalankan seluruh kegiatan yang dikerjakan. Sesuai dengan komitmen DPRD Kota Batam dan Walikota Batam untuk menjadikan kota Batam yang bersih dan madani. Maka kami selaku DPRD Kota Batam melakukan pembahasan anggaran untuk digunakan selama satu tahun dan mengawasi kemana saja anggaran serta digunakan untuk apa.”

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Batam telah dianggarkan oleh DPRD Kota Batam selama satu tahun penuh untuk operasional pengelolaan sampah. Namun dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Batam guna memberikan stimulus bantuan kepada Dinas terkait pengelolaan sampah masih merasa kurang optimal dalam penggunaan anggaran tersebut. Sehingga perlu dilakukannya pengawasan yang optimal dari DPRD Kota Batam untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, agar mendapatkan win-win solusi dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Batam.

Pelaksanaan program pemerintah untuk memberikan pengaruh yang besar dalam pengelolaan sampah di Kota Batam perlu dilakukan seoptimal mungkin guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Program pemerintah dengan memanfaatkan kegiatan bank sampah yang telah menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kota Batam terkait dengan Perda No 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Namun seiring jalannya pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam, kegiatan bank sampah masih belum berdampak signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pengelolaan sampah di Kota Batam.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber RBB, bahwa pelaksanaan bank sampah guna mendukung kegiatan pemerintah dalam pengelolaan sampah masih banyak terjadi kendala seperti, ketersediaan lahan masyarakat untuk menampung hasil dari masyarakat, ketersediaan alat pengelolaan sampah serta bau yang menyengat apabila proses pengelolaan sampah tersebut terlalu lama ditempat bank sampah tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait pemanfaatan bank sampah yang mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Menggunakan sumber-sumber daya yang ada merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil dari setiap kebijakan yang ditetapkan.

Pemanfaatan masyarakat sebagai sumber daya yang ada merupakan salah satu langkah yang baik guna menciptakan pengelolaan sampah yang baik kedepannya. Namun keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam program

pemerintah yaitu bank sampah yang kurang optimal dilakukan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Pelayanan Publik Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Bengkong

Menganalisis implementasi kebijakan tidak terlepas dari pelayanan publik. Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah, pemerintah kota Batam membuat suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di kota Batam. Agar dapat mengatasi permasalahan sampah di kota Batam lebih jauh, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah. Pemerintah juga sudah mewacanakan untuk adanya pengolahan sampah di pihak ketiga sesuai dengan yang tertera pada Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang 'Pengolahan Sampah'. Disitu bahwasanya dijelaskan 'Pemerintah melakukan reuse, *reduce* dan *recycle*..' Hal tersebut perlu dilakukan karena kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang cepat atau lambat jika permasalahan sampah tidak bisa diatasi secara langsung dan cepat oleh pemerintah akan berdampak buruk bagi kota Batam itu sendiri karena keterbatasan lahan yang ada.

Pada peraturan Pemerintah Kota Batam No 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah di kota Batam yang berbasis deng 3R *reuse*, *reduce*, *recycle*, di mana pada saat pengelolaan sampah harus bisa dioptimalisasikan dengan pemanfaatan hasil sampah yang di ciptakan oleh masyarakat maupun dari sampah industri. Menurut tanggapan dari narasumber DJ.

“Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam masih belum sepenuhnya melakukan apa yang telah dianjurkan atau ditetapkan oleh Perda. Hal ini terjadi karena masih kurangnya bank-bank sampah di setiap kecamatan dan turun lagi ke kelurahan serta ketingkat RT/RW. Namun hal ini tidak serta-merta membiarkan kejadian ini terus terjadi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya penegakan Perda yang telah kita tetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah Kota Batam itu sendiri. Kedepannya untuk bank-bank sampah akan kita tingkatkan pengadaannya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat hingga sampai ke RT/RW”

Proses pengelolaan sampah menurut standar penanganan modern sebagaimana diketahui, yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan pembangunan perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek teknis secara simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri, 2007).

Di mana dalam mata rantai pengelolaan sampah yang berbasis dari 3R (reuse, reduce dan recycle) sampah dikumpulkan, dipilah dan kemudian didaur ulang. Artinya pemerintah kota Batam perlu melakukannya pengkajian terhadap pemanfaatan sampah sebagai peluang untuk masyarakat untuk menambah penghasilan ekonomis. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah kota Batam juga sudah menerapkan konsep bank sampah di setiap Kecamatan untuk mengakomodir sampah-sampah yang mempunyai nilai jual sebelum dilakukan proses pembuangan sampah ke tempat akhir. Pemerintah kota Batam dibawah Kecamatan Bengkong terus melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang masih belum optimal serta terus menciptakan inovasi-inovasi bekerja sama

dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam agar tercipta pelayanan yang optimal dan prima kepada masyarakat kota Batam . Menanggapi hal ini narasumber YM mengatakan:

“Ya. Jadi ada beberapa kecamatan itu sudah melakukan, termasuk kemarin kalau nggak salah bank-bank sampah itu Batam Kota. Kemudian yang mendaur ulang itu Sagulung, kalau nggak salah, sama Batuaji. Ada mesin yang dibantu oleh pemerintah dari perusahaan untuk mengolah itu. Ya, jadi sebenarnya ini juga yang kita dorong pemerintah. Tapi karena wacana itu bahwa Batam ini akan dikelola perusahaan, jadi makanya kita kemarin tidak terlalu terfokus kesitu. Karena Pemerintah Kota Batam mewacanakan ya itu tadi, pengolahan di Punggur itu. Istilahnya secara teknologi. Jadi makanya kita kemarin tidak terfokus lagi ke per-kecamatan. Kalau daerah lain seperti di Balikpapan itu, ya itu tadi, samping per kecamatan ya itu pengelolaannya tadi apa namanya..”

“Reduce, reuse, sama recycle.”

Berarti pemerintah masih menunggu dari pihak ketiga yang ingin merealisasikan program dari pemerintah tersebut. Perlu adanya percepatan untuk menentukan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kota Batam untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan sampah dan memberikan pelayanan publik yang optimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak langsung dari penetapan Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di kota Batam.

Terdapat beberapa titik di kecamatan di kota Batam sudah tersedia kegiatan Bank Sampah yang merupakan salah satu sarana yang di buat pemerintah kota Batam untuk penanggulangan sampah yang mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat. Kita sekarang mulai untuk melaksanakan program tersebut, karena pengelolaan sampah sudah di alihkan melalui tingkat kecamatan tidak lagi oleh dinas terkait secara langsung. Ini akan memudahkan untuk memberika sosialisasi

kepada masyarakat untuk memulai dari diri sendiri dalam pemilahan sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga masing-masing masyarakat yang menjadi nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri.

Jadi pada saat ini dengan bergantinya kebijakan oleh pemerintah kota Batam pada setiap pengelolaan sampah dilakukan pada setiap kecamatan yang ada di Kota Batam pemerintah berusaha untuk menerapkan prinsip 3R dalam pengelolaan sampah yang ada di kota Batam kedepannya agar mendapatkan pengelolaan sampah bagi masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien.

Dalam beberapa hal permasalahan yang terjadi pada pengelolaan sampah di kota Batam khususnya Kecamatan Bengkong mempunyai tolak ukur keberhasilan pengelolaan sampah dengan mengikut sertakan masyarakat, perlu dilakukannya sebuah pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar sedini mungkin untuk memilah hasil sampah rumah tangganya yang mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini mengembangkan konsep malfunction dari kegiatan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam, dengan istilahnya dalam satu kebijakan itu bukan benar dan salahnya tapi secara garis besar apa yang menjadikan dalam malfunctionnya itu. Istilahnya kalau dibilang praktiknya itu, apa yang menjadi kejanggalan dan apa yang harus di luruskan kedepannya sehingga menciptakan pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien . Jadi dengan data ini akan diambil suatu permasalahan yang berkaitan dengan teori mana yang bisa kita ambil sehingga didapatkan permasalahan yang terjadi dari

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam.

Pemanfaatan hasil sampah masyarakat yang masih kurang optimal oleh pemerintah itu sendiri ditandai dengan masih sedikitnya dibentuknya kelompok-kelompok bank sampah di masyarakat yang bisa di gunakan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat pada umumnya. Pemerintah perlu melakukan pola-pola yang terukur dalam setiap langkah kebijakan yang diambil agar memudahkan masyarakat untuk menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

Namun apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya harus terorganisir dengan baik mulai dari pelaksanaan harus dilakukan kontrol agar dapat memberikan input dalam pelaksanaan kebijakan serta mendapatkan output yang baik dalam pemberian pelayanan publik untuk masyarakat sehingga suatu kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh pemerintah itu sendiri.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Bengkong

Penyelenggara di lapangan dalam hal implementasi kebijakan sampah di Kota Batam adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Dinas ini diatur dengan Perda No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Batam. Namun untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah dialih fungsikan kepada setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam guna mempermudah dalam proses pelaksanaannya. Adapun penyelenggara tugas pengelolaan sampah adalah

narasumber AS sebagai pelaksana tugas di Kecamatan Bengkong. Dimana dengan terbentuknya kebijakan baru dari pemerintah daerah kota Batam yang memberikan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk mengelola sampah yang ada di Kota Batam secara menyeluruh. Namun dengan adanya kebijakan bahwasanya pengelolaan sampah dikembalikan kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Batam.

Pengelolaan sampah yang langsung dilakukan oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Batam telah berjalan hampir tiga tahun ini, dimulai sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang. Di Kecamatan Bengkong sendiri pengelolaan sampah masih berjalan belum optimal untuk memberikan pelayanan yang baik untuk setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Bengkong. Menurut narasumber AS selaku koordinator pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong adalah sebagai berikut :

“Disini kalau untuk pengelolaan secara terbuka, maksudnya saling ada positifnya ke pengelola dan ke pekerja itu mungkin bisa dikatakan masih kurang, masih minim. Karena di Bengkong ini, khusus untuk Bengkong, belum ada pemberdayaan bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebelum sampah hasil dari rumah tangga di buang ke TPS. Disini kecamatan bengkong baru ada sampah TPS, Tempat Penyimpanan Sementara. Bukan akhir. Akhir kan kita harus mesti ke Punggur. Kalaupun ada pengelolaan itu di Punggur, bukan di Bengkong. Saya rasa, untuk pengelolaan, itu saja.”

Dari informasi yang didapatkan dari salah satu narasumber mengatakan di Kecamatan Bengkong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam pengelolaan sampah masih dikatakan kurang optimal. Maka pemerintah disini perlu melakukan inovasi-inovasi seperti membentuk suatu kelompok masyarakat di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk dapat

berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga yang mempunyai nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong sejatinya masih belum sempurna, dikarenakan baru berjalan 3,5 tahun ini. Kebijakan pemerintah untuk memberikan ruang kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Batam untuk mengatur sendiri pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing masih banyak terdapat kendala dilapangan, seperti tempat pembuangan sampah sementara yang masih belum dimiliki oleh setiap Kecamatan di Kota Batam karena keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara dari hasil sampah rumah tangga.

Terjadinya permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong tidak sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah saja, kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat dan bersih juga masih banyak yang belum menyadari sepenuhnya. Masyarakat seharusnya juga bisa mengoptimalkan hasil sampah rumah tangganya untuk memilah berbagai jenis sampah yang mempunyai nilai jual ekonomis sebelum di letakkan di tong sampah dan diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara.

Dengan adanya pembuangan sampah sementara yang disiapkan oleh pemerintah Kecamatan Bengkong sebagai fasilitas tempat pembuangan sampah, sementara bagi masyarakat masih saja terjadi pelanggaran oleh masyarakat untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga masih terlihat beberapa tempat lokasi di Kecamatan Bengkong sampah berserakan di jalan. Menurut salah

satu narasumber AS bagaimana partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam program pemerintah untuk menangani pengelolaan sampah :

“Ya kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih bandel untuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Pada hal kita sudah menyiapkan bin-bin sampah di setiap wilayah Kecamatan Bengkong yang mudah dijangkau untuk dijadikan tempat penampungan sampah sementara.

“Kalau boleh tau dimana saja di letakkan bin-bin penampungan sampah sementara itu?”

“Kalau titik-titik disitu banyak. Jadi kalau di *bin* 1 ada saja. Dan kalau nggak salah kemarin diwajibkan per perumahan ada *bin*. Tapi itu nggak bisa mendasar. Mungkin karena apa lah itu. pokoknya mungkin.. Tapi kalau untuk pengelolaan bin sampah kita itu, titik-titiknya lumayan banyak. Kalau pantauan saya, khususnya yang dekat sini, di daerah saya itu ada di Sungai Nayon, Grinton, Cahaya Garden, ada juga 1 biji *bin* di Golden Prawn, di dekat SMP 4 BengkongPolisi.”

Melihat dari pernyataan dari narasumber masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong yang dapat dilihat masih kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk berperan penting mensukseskan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tentang pengelolaan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya kebersihan untuk semua masyarakat yang ada di Kecamatan Bengkong yang membuang sampah hasil rumah tangganya di sembarangan tempat. Menurut dari narasumber AI selaku ketua RW 02 Kecamatan Bengkong menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya kebijakan baru yang diterapkan pemerintah dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Batam pada saat ini dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup Kota Batam, namun dimana Dinas tersebut hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah karena sudah dialihkan kepada setiap kecamatan di Kota Batam. Kecamatan Bengkong pada saat ini telah memberikan informasi kepada setiap masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, dengan

mengharuskan setiap rumah memiliki tong sampah agar sampah mudah untuk diangkat dari perumahan warga. Namun tidak semua warga mematuhi aturan ini sehingga masih terjadi pembuangan sampah tidak pada tempatnya, dengan alasan rumah kami kan tidak bisa dilalui mobil pengangkut sampah jadi buat apa tong sampah didepan rumah...”

Idealnya partisipasi warga dilakukan dengan bekal pemahaman atas pentingnya mengelola sampah dengan baik mengingat risiko dari adanya pembuangan sampah yang tidak benar sebetulnya merugikan semua warga. Jika sampah tercecer di mana-mana, atau saluran air tersumbat oleh pembuangan sampah sembarangan, maka lingkungan berpotensi tidak sehat. Artinya tumpukan sampah akan dihindangi lalat-lalat, dan lalat merupakan penyebar hama penyakit. Sedangkan sampah rumah tangga dengan berbagai sisa kegiatan rumah tangga sangat berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya hama-hama penyakit berbahaya. Berikut tanggapan dari masyarakat Kecamatan Bengkong yang diwakili oleh narasumber RB sebagai berikut:

“Masih kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di lingkungan Kecamatan Bengkong disadari dengan berbagai alasan dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya, kita buang ke bin-bin sampah yang sudah disiapkan oleh pemerintah namun bin sudah penuh terpaksa kita letakan dibawah atau disamping bin tersebut, sehingga lama kelamaan sampahnya jadi berserakan di jalan raya kenak hujan terbawa air. Seharusnya pemerintah juga harus siap untuk menyediakan bin-bin yang memadai dan cepat untuk proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA”

Permasalahan yang terjadi bukan hanya karena kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, akan tetapi masih kurangnya ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota juga merupakan kendala yang masih terjadi pada proses pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong. Tanggapan dari narasumber AS selaku koordinator pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong seperti berikut:

“ Memang benar kita masih kekurangan armada untuk mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir yang berada di punggur. Saat ini kita mempunyai armada Ada 15 operasional pick up, 1 amrol. Pamrol ini mengangkat yang di TPS. Namun untuk armada tersebut belum mencukupi dalam pengangkutan sampah yang ada ki Kecamatan Bengkong. Akan tetapi kita terus berupaya untuk bisa mengoptimalkan penggunaan armada tersebut...”

Pengolahan sampah ini harus dilakukan dengan baik agar bisa tertata dengan bersih, rapi, Kota Batam pun jadi indah. Apakah ada kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup, selaku pejabat ya di Kecamatan Bengkong sebagai pengelola, misalnya kan selama ini sampah hanya sebagai diangkut, dikumpulkan, dan dibuang. Sementara dalam kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang ‘Pengelolaan Sampah’ itu dijelaskan bahwasanya, di pasal 8 itu dijelaskan bahwasanya pemerintah itu melakukan pengolahan sampah dengan cara di reduce, reuse, sama recycle. Berarti dikumpulkan, dipilih, dan didaur ulang. Apakah ada di Kecamatan Bengkong ini kegiatan itu yang dilakukan oleh. Mungkin dari Dinas ada penyuluhan kepada masyarakat untuk membuat bank-bank sampah mengumpulkan.

Terhambatnya petugas kebersihan disetiap Kecamatan untuk mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dikarenakan akses jalan masuk menuju tempat-tempat sampah masyarakat yang sempit juga menjadi fokus dari pemerintah untuk mengevaluasi dan mengedukasi masyarakat untuk mengumpulkan sampah-sampah hasil rumah tangga untuk di kumpulkan di depan rumah masing-masing dan petugas kebersihan akan mengambil sampah di setiap rumah yang tidak bisa dilalui dengan truk sampah mengalih gunakan kendaraan motor roda tiga agar sampah yang ada bisa efektif untuk dikumpulkan kedepanya tanpa ada yang tersisa lagi.

Secara garis besar dalam pengimplementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013. Dimana pemerintah juga harus melakukan kegiatan, dimana pemerintah berperan dalam pengelolaan sampah harus melalui 3R, *reuse, reduce dan recycle*, yang merupakan salah satu dari kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat dari narasumber tokoh masyarakat Kecamatan Bengkong narasumber AM mengatakan :

“ Masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui tentang pengelolaan sampah harus menggunakan teknik 3R, selama ini masyarakat hanya melakukan pengelolaan sampah langsung dibuang ketempat sampah tanpa memilih sampah yang mempunyai nilai jual kembali. Sehingga sampah kebanyakan dari masyarakat tidak melakukan pemilihan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah”

Dalam hal ini pemerintah masih belum bisa mengefektifkan pemberian sosialisai kepada masyarakat untuk melakukan pengumpulan atau pembagian sampah kedalam pengelompokan sampah yang bisa digunakan kembali untuk menjadi nilai jual yang menjadi tambahan bagi masyarakat untuk menjadi nilai ekonomis. Masalah ini yang lah yang masih dihadapi sebahagian di kota-kota besar . Dengan adanya asumsi jumlah penduduk Kota Batam pada saat ini 1,3 juta jiwa dengan jumlah penduduk tersebut Kota Batam masuk kedalam kota terbesar nomor tiga penduduknya di wilayah Sumatera setelah Medan sama Palembang. Jika pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan cara angkut dan kumpul tanpa ada nya pemilahan sampah maka cepat atau lambat tempat pembuangan akhir sampah akan penuh dan cepat atau lambat maka akan terjadi penumpukan yang menyebabkan lokasi yang TPA akan penuh dengan sampah.

Melihat dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah pada Pemerintahan Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong masih tergolong rendah tingkat kesadaran dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar. Menurut wawancara dengan narasumber AS menanggapi permasalahan ini sebagai berikut :

“Oke terima kasih. Itulah. Kalau untuk masalah pemilihan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sejauh ini masih belum optimal, karena kita selaku pekerja yang melakukan pemungutan sampah hasil dari rumah tangga masih mendapatkan sampah yang bercampur dengan sampah plastik, besi sampah rumah tangga dan sampah limbah. Masih kurangnya kesadaran masyarakat kita juga tidak terlepas dari masih belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui informasi-informasi di setiap kelurahan untuk memberika pemahaman kepada masyarakat untuk bisa memilah sampah hasil rumah tangga sebelum dibuang. Namun ada sisi positifnya juga untuk kita sebagai pekerja pemungut sampah hasil rumah tangga yang bisa kami pilih untuk dijadikan nilai tambah kami untuk mendapatkan uang dari hasil pemilahan sampah tersebut. itu. Pada saat misal dicampak ini pilh yang mana plastik, yang mana kertas, yang mana besi timah apa semua.”

Pelaksanaan pengelolaan sampah sejauh ini berarti pengelolaannya itu hanya sebatas dari pengumpulan sampah dari hasil rumah tangga dan yang melakukan pemilahan sampah tersebut adalah petugas pemungut sampah tersebut yang melakukan pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah masih kurang dan perlu adanya pemberian sosialisasi kepada masyarakat agar lebih paham dan mengerti akan pentingnya proses pengelolaan sampah di tingkat paling bawah yaitu sampah hasil dari rumah tangga itu sendiri, sehingga mendapatkan nilai tambah dari sampah yang dihasilkan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peran serta dari

masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan outcome (keluaran) dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong, pemerintah perlu melakukan cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam khususnya Kecamatan Bengkong itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong bisa dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang mendasar kepada masyarakat akan pentingnya memilah sampah sebelum di buang, karena dari hasil sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Jadi masukan apa yang bisa bapak masukkan untuk dalam penulisan saya nanti menurut bapak, pengalaman bapak selama bekerja di Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai pelaksana pengolahan sampah di Kecamatan Bengkong. Apa yang, kekurangannya lah gitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari yang bapak alami itu, kita bisa merubah ke depannya nanti saya melakukan penulisan penelitian ini. Apa yang bisa narasumber sampaikan?”

“Oke makasih. Kalau menurut saya, masukan-masukan itu, nomor satu itu kita melakukan – boleh dikatakan gencar lah – melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran terhadap sampah. Itu tak ada ... khusus, tak ada lah. Pokoknya semua. Karena kan sampah memang tanggung jawab kita bersama. Dan yang kedua, bank sampah kalau bisa dimaksimalkan. Di Kota Batam ini kan kebanyakan perumahan. Kalau bisa, entah bisa masuk ke pemerintahan, entah siapa, kita masuk mereka supaya gencar membuat di 1 perumahan dibuat bank sampah. Jadi masyarakat pun sebelum membuang sampah ke tongnya masing-masing, mereka sudah memilih sendiri, yang mana yang bisa – bahasa kasarnya –

dijadikan duit sebelum mereka buang sampah. Jadi mau tidak mau mereka akan sadar kalau sampah ternyata bukan hanya sebuah kotoran. Bisa dijadikan untuk bahan yang berguna. Nah gitu. Itulah kesadaran masyarakat sendiri lah. Kita pun, kadang susah juga dengan masyarakat kita ini. Tapi setidaknya kan selama itu bisa diubah, kenapa tidak kita ubah. Sosialisasi yang penting. Yang kedua, bank sampah setiap perumahan kalau bisa ada. Dan walaupun misalnya itu terjadi, sosialisasi kan tentu untuk membangun kesadaran masyarakat. Kalau mereka sudah sadar tentunya kan tak perlu lagi kita jaga-jaga. Ya kan. Yang kita maksimalkan itu mobil-mobil maksimal terus kan, ke perumahan mereka maksimal masuk. Karena biasanya itu perputarannya per perumahan atau per wilayah. Ya itu per RW lah, 2 hari sekali mobil kami masuk.”

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap narasumber yang menjadi informan peneliti, bahwasanya pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara lebih baik lagi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah yang bisa dijadikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah yang bisa menjadi nilai jual ekonomis serta menyediakan bank-bank sampah di setiap RW yang ada di Kecamatan Bengkong

Namun pada akhirnya pilihannya kembali ke masyarakat juga, apakah kesadaran masyarakat dalam mengikuti setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah diikuti atau malah tidak peduli. Karena idealnya pengelolaan sampah bukan semata-mata tugas pemerintah itu sendiri, melainkan peran dari masyarakat sangat membantu pemerintah untuk mengatasi secara bersama-sama permasalahan sampah yang masih kunjung bermasalah di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong.

Secara wilayah di Sumatera dan sekitarnya, maka posisi kota Batam dalam 20 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk , serta aktifitas

perekonomian. Sehingga boleh dikatakan bahwa kota Medan, Palembang dan Batam merupakan kota dengan pertumbuhan tergolong pesat, demikian pula dengan penimbunan sampah. Narasumber FZ mengatakan:

“Setelah Medan, Palembang, baru Batam kan. Batam termasuk yang kota besar dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar ya. Penduduk sekarang ini sekita 1,3 juta jiwa Batam. Jadi kalau lah, ini kan masih asumsi ataupun pendapat saya ya, misalnya lah dengan 1 jiwa saja itu menghasilkan 0,5 kg sampah per harinya, itu mungkin kalau dalam 1 harinya itu dikalikan 1,3 juta jiwa itu bisa sampai ya seperti bapak bilang, 400-500 ton-an lebih lah. Ya, hampir 800-an.

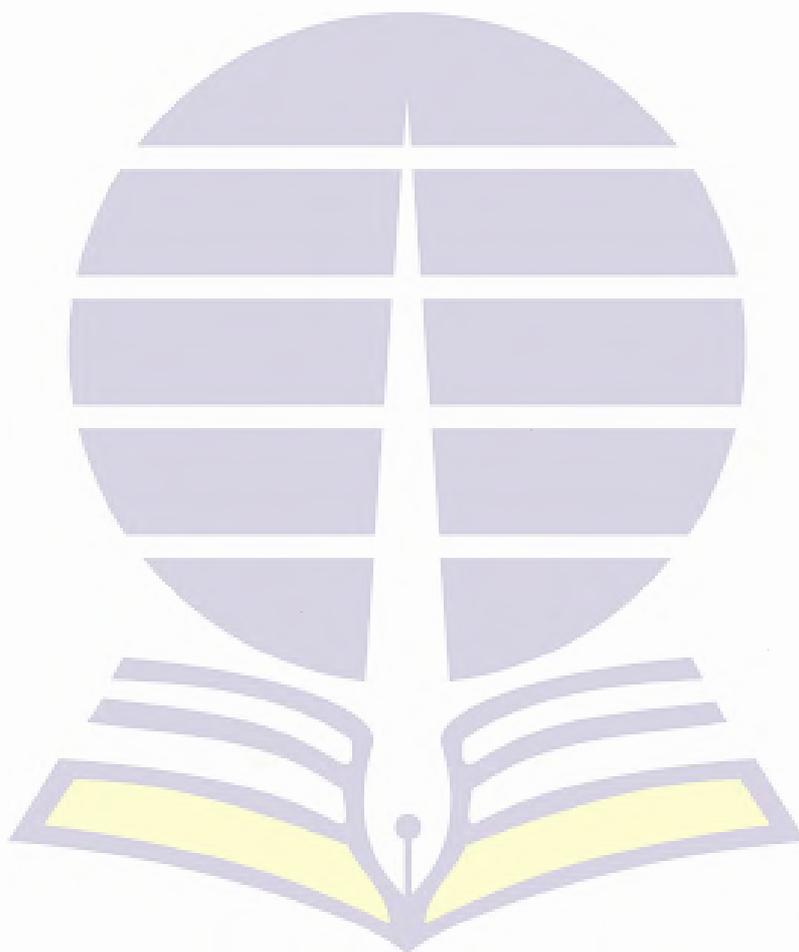
“Nah ini kan ada wacana untuk melakukan pemberian kepada pihak ketiga untuk mengelola sampah ini supaya menghasilkan energi listrik yang bisa digunakan untuk masyarakat. Nah sejauh mana sudah dilakukannya, pak?”

“Ya, jadi memang salah satu daerah yang bisa tertarik dari pihak ketiga itu ya Batam. Karena Batam ini kan ibarat itu satu kelompok, satu lokasi saja, tidak berjauhan. Kalau daerah lain mungkin misalnya ya berapa jarak, berapa kilo, berapa jam bisa.. Kalau ini kan untuk Batam.. Nah jadi sangat strategis untuk pengolahannya pihak ketiga itu. dan kemudian sampah itu kemungkinan dia akan mencapai 1.000 ton per hari.”

Melihat dari hasil sampah yang ditimbulkan dapat dihitung rata-rata yang dihasilkan 600-800 ton per harinya. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyeleasain permasalahan sampah yang ada di Kota Batam. Hal ini dilakukan agar pengelolaan sampah di Kota Batam dapat terorganisir dengan baik serta mendapatkan hasil yang optimal dari pengelolaan sampah yang ada.

Pemanfaatan bank sampah di setiap RT/RW sangat berpengaruh untuk memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang ada di setiap Kecamatan dengan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar. Pemerintah harus terus mengoptimalkan peran masyarakat dalam mensukseskan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan informasi dan sosialisasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.

Sehingga kedepannya masyarakat akan sadar dengan sendirinya betapa pentingnya kebersihan dan pemanfaatan pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan nilai jual ekonomis yang tinggi. Serta masyarakat mengetahui setiap kebijakan yang ditetapkan sejatinya kegunaannya untuk kepentingan masyarakat sepenuhnya.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dilihat dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam, khususnya di Kecamatan Bengkong Pemerintah belum optimal dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat. Masyarakat di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum memahami pentingnya pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Partisipasi dibangkitkan oleh komunikasi informasi yang relevan dan mudah diterima oleh masyarakat di lingkungan Kecamatan Bengkong belum membuat warga untuk dapat memahami pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat pemerintah. Warga belum menyadari bahwa, pengelolaan sampah yang baik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau implementasi kebijakan belum didukung oleh sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Masyarakat belum paham betul luaran dari kebijakan yang diterapkan.

Mengimplementasikan kebijakan bukan semata-mata hanya memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka, tetapi peran pemerintah untuk mengawasi jalannya implementasi kebijakan juga merupakan salah satu dari proses berjalannya kebijakan tersebut. Masih rendahnya pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong ditunjukkan oleh belum berhasilnya pemerintah setempat mendapatkan hasil yang optimal dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam

Dengan dikelolanya sampah oleh Kecamatan secara langsung telah terjadi pengurangan tumpukan sampah di rumah-rumah warga, sehingga pengumpulan sampah lebih cepat dan terorganisir langsung dibawah kendali Camat. Namun demikian kecepatan kerja masih dihadapkan pada keterbatasan armada di setiap Kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam, dilihat dari hasil pembahasan masih belum maksimal untuk memperdayakan masyarakat agar ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah. Hal ini terjadi karena pemerintah masih belum optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikutsertakan dirinya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

B. Saran

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam yang dikelola oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Batam harus selalu mengevaluasi hasil kinerja setiap perangkat yang mempunyai peran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di setiap Kecamatan. Hal ini berguna untuk mengukur sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di setiap Kecamatan bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Untuk segi implementasi yang diharapkan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah disetiap lingkungan yang ada menginginkan pemerintah bisa cepat dan tanggap dalam hal pemberian pelayanan seperti pengangkutan sampah rumahtangga yang tepat waktu atau sesuai jadwal yang telah ditentukan, hal ini berkaitan dengan penumpukan sampah di wilayah tertentu.

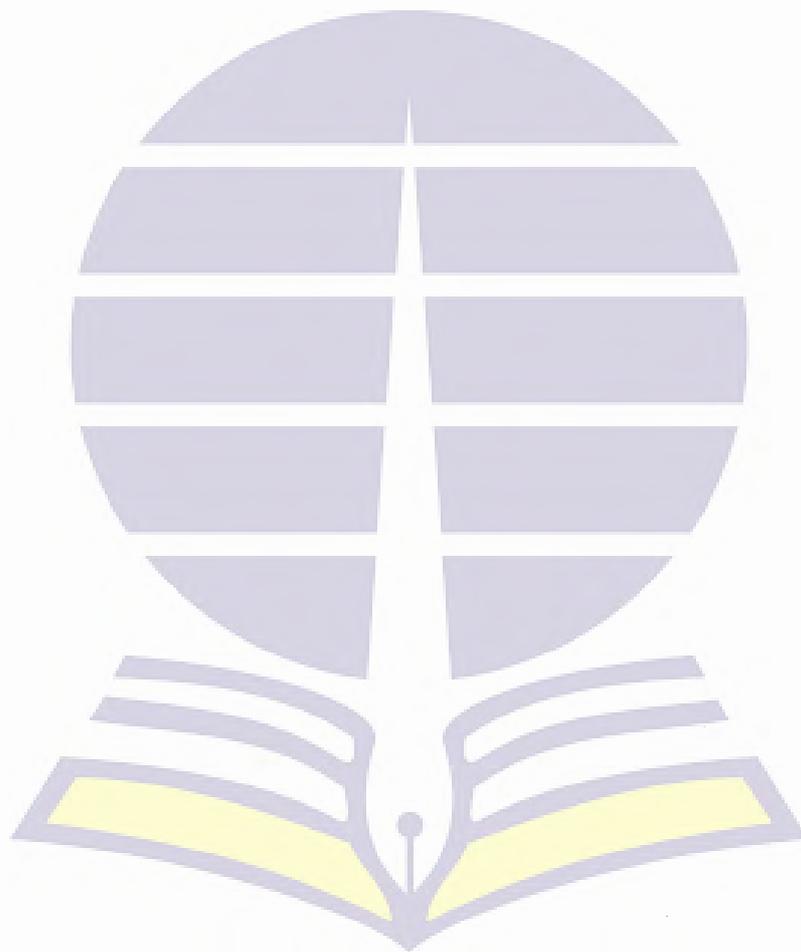
Pemberian informasi terkait program pemerintah tentang pengelolaan sampah sebaiknya lebih efektif dan efisien, seperti bank sampah tepat sasaran kepada setiap masyarakat agar tercapainya tujuan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota. Masyarakat perlu mengetahui info-info seputar kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan pengelolaan sampah di Kota Batam untuk mencapai selogan Kota Batam yang bersih dan madani.

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna menimbulkan efek kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat paham dan sadar pentingnya kebersihan di lingkungan masing-masing dan dapat memanfaatkan hasil sampah rumah tangga yang bisa digunakan sebagai barang tambah penghasilan bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian di Kota Batam, serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai jual yang tinggi apabila bisa dimanfaatkan dengan yang sebenarnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk memberikan nilai tambah kebutuhan ekonomis juga, memberikan pengetahuan agar bisa mengurangi dampak sampah dari hasil rumah tangga, menggunakan kembali sampah rumah tangga yang dihasilkan serta memisahkan sampah yang bisa di daur ulang agar bisa mendapatkan nilai jual ekonomis bagi masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana implementasi kebijakan perlu memberikan informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat agar masyarakat paham dan ingin ikut berpartisipasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Memberikan informasi sangatlah penting untuk menjadikan masyarakat tahu betul nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat bagaimana cara mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari limbah sampah rumah tangga agar dapat menjadi nilai jual, serta pemerintah juga membuat suatu gerakan bank sampah di setiap RW (Rukun Warga) di Kota Batam secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Erwan Purwanto, S. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik, Edisi 1*. Jakarta: Alfabeta.
- Apriadi, W. H. (1998). *Memproses Sampah*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Boediono, B. (2003). *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan Sosial Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Creswell, J. W. (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Achmad Fawaid, Penerjemah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Damanhuri, E. (2007). *Sampah Indonesia*. Bandung: Teknik Lingkungan ITB.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Utami, Eka. (2013). *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*. Jakarta: Yayasan Unilever Indonesia.
- Hadiwiyoto, S. (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. Bandung: Mandar Maju.
- Irfan, I. M. (2000). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bandung: Sinar Grafika.
- Irfan, I. M. (2016). *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mtra Wacana Media.
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riant, N. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riant, N. (2008). *Public Policy: Teor Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumus Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Riant, N. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Elex Media Komputindo.

Slamet, J. S. (2009). *Kesehatan Lingkungan Cetakan ke-8*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subarsono, A. (2006). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subarsono, A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwitri, S. (2016). *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Tangkilisan, H. N. (2003). *Wacana Kebijakan Publik Indonesia*. Yogyakarta: Lukman Offset.

Tjiptono, F. D. A. (1995). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wahab, S. (2001). *Analisis Kebijaksanaan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, B. (2005). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tesis

Artiningsing, N. K. (2008). *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Studi Kasus: Di Sampangan dan Jombang, Kota Semarang)*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Sasmita, W. T. (2009). *Evaluasi Program Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus : Pengelolaan Sampah Terpadu Gerakan Peduli Lingkungan GPL Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi Selatan)*. Bekasi: Institut Pertanian Bogor.

Jurnal International

Donna A. dan Heru H. (2016). Bank Sampah (Waste Banks) as an Alternative of Community-Based Waste Management Strategy in Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol.23, No. 1, Hal. 136-141

RA, Pratama. (2017). *The Opportunities to Strengthen the Role of Bank Sampah to Reduce Municipal Waste Case Study: Bank Sampah*. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 18, No 1, Hal. 112-116

Sari, Putri, Nilam. (2016). *Solid Waste Management Analysis In District Banuhampu Agam Regency*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* . Vol. 10, No. 2, Hal. 157-165.

Peraturan Perundang-Undangan

Batam, P. (2013). *Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah*. Batam: Pemko Batam.

Indonesia, R. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038*. Jakarta: Republik Indonesia.

Indonesia, R. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis*. Jakarta: Republik Indonesia.

Kemendagri. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 33 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kemendagri.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Batam

<https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/indonesia-hasilkan-67-juta-ton-sampah-pada-2019/1373712>

[https://wartakepri.co.id/2020.Kunjunganwisman2019kebatamcapai168ribu,tigabe-sardarisingapura,malysiadanchina\(januari15\)](https://wartakepri.co.id/2020.Kunjunganwisman2019kebatamcapai168ribu,tigabe-sardarisingapura,malysiadanchina(januari15))